

No Katalog : 4102004.3210

ISSN : 2686-357X

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN MAJALENGKA 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAJALENGKA**

No Katalog : 4102004.3210

ISSN : 2686-357X

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
KABUPATEN MAJALENGKA
2023**

<https://majalengkakab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAJALENGKA**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN MAJALENGKA 2023

ISSN : 2686-357X
No. Publikasi : 32100.2132
Katalog : 4102004.3210
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xiv + 99 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Ilustrasi Kulit:

www.canva.com

Diterbitkan oleh:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN MAJALENGKA

2023

TIM PENYUSUN

Pengarah : Joni Kasmuri, SST., SE., ME.

Penanggung Jawab : Fenty Jimika, SST., MAP.

Naskah : Deni Rakhmat Kusuma, SP., M.Ec.Dev.

Infografis : Deni Rakhmat Kusuma, SP., M.Ec.Dev.

Gambar Kulit : Deni Rakhmat Kusuma, SP., M.Ec.Dev.

Penyunting : Fenty Jimika, SST., MAP.

Yesi Desiawati Sirman, SST., MAP.

KATA PENGANTAR



Pembangunan merupakan *bussines process* yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, baik daerah maupun pusat. Salah satu parameter keberhasilan pembangunan adalah terciptanya tatanan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam konteks ekonomi kekinian, banyak ekonom sepakat bahwa hakikat dari tujuan utama pembangunan adalah membangun kualitas manusia seutuhnya diantaranya melalui peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan tidak hanya dipandang dari sudut pandang dimensi ekonomi saja, melainkan sebagai satu kesatuan utuh dengan perikehidupan manusia lainnya, termasuk di dalamnya dimensi sosial. Untuk mengukur sejauhmana keberhasilan pembangunan, maka diperlukan evaluasi terhadap sejumlah indikator yang menggambarkan taraf kesejahteraan rakyat.

Publikasi **Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023** merupakan publikasi yang rutin diterbitkan secara berkala setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majalengka, di dalamnya menyajikan informasi perkembangan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Majalengka antar periode waktu. Publikasi ini berisi kompilasi data yang bersumber dari data BPS, diantaranya yaitu hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2022 dan kegiatan pendataan lain yang diselenggarakan oleh BPS.

Publikasi ini menyajikan analisis berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan

taraf kesejahteraan dikaji dan diklasifikasikan menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik bagi instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi, maupun masyarakat luas. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi berbagai pihak sehingga publikasi ini dapat terbit tepat waktu.

Majalengka, Desember 2023
Kepala BPS Kabupaten Majalengka



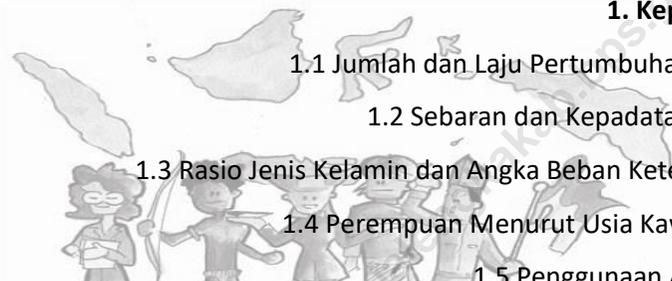
JONI KASMURI

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xv

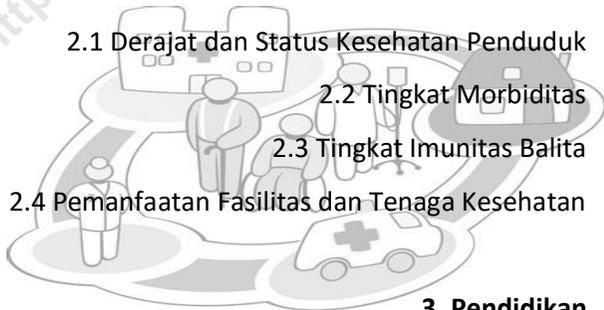
1. Kependudukan **3**

1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	4
1.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk	6
1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan	9
1.4 Perempuan Menurut Usia Kawin Pertama	12
1.5 Penggunaan Alat/Cara KB	14



2. Kesehatan **17**

2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	18
2.2 Tingkat Morbiditas	19
2.3 Tingkat Imunitas Balita	20
2.4 Pemanfaatan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan	21



3. Pendidikan **27**

3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis	28
3.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah	29
3.3 Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	30
3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah	31
3.5 Pendidikan Anak Usia Dini	33



Daftar Isi

39	4. Ketenagakerjaan	
40	4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	
44	4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
46	4.3 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	
53	5. Taraf dan Pola Konsumsi	
54	5.1 Pengeluaran Rumah Tangga	
61	6. Perumahan dan Lingkungan	
61	6.1 Status Kepemilikan Rumah Tinggal	
63	6.2 Fasilitas Rumah Tinggal	
67	7. Kemiskinan	
69	7.1 Perkembangan Penduduk Miskin	
70	7.2 Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	
73	7.3 Karakteristik Pendidikan Penduduk Miskin	
74	7.4 Karakteristik Ketenagakerjaan Penduduk Miskin	
76	7.5 Fasilitas Bantuan yang Diterima Rumah Tangga Miskin	
81	8. Sosial Lainnya	
81	8.1 Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi	
82	8.2 Program Perlindungan Sosial	

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk, 2022	4
Tabel 1.2 Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan, 2022	7
Tabel 2.1 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2020-2022	22
Tabel 2.2 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat Jalan, 2018-2022	23
Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2018-2022	28
Tabel 3.2 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2022	31
Tabel 3.3 APS, APM dan APK Formal dan Non Formal Penduduk Menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2022	32
Tabel 3.4 Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 0-6 Tahun Menurut Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah, 2022	34
Tabel 3.5 Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun yang Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Jenis Pendidikan dan Menurut Jenis Kelamin, Tahun Ajaran 2021/2022	35
Tabel 4.1 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2018-2022	47
Tabel 5.1 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Majalengka, 2022	57

Daftar Tabel

- 58 Tabel 5.2 Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang dan Kelompok Pengeluaran, 2022
- 62 Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah, Tahun 2018–2022
- 63 Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, Tahun 2018–2022
- 76 Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga Miskin yang Pernah Menerima Raskin, Rata-rata Raskin dan Rata-rata Harga di Kabupaten Majalengka, 2018–2022
- 82 Tabel 8.1 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke atas menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir, 2018–2022
- 83 Tabel 8.2 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima, 2022

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2022	8
Gambar 1.2 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan, 2022	9
Gambar 1.3 Piramida Penduduk, 2022	10
Gambar 1.4 Angka Beban Ketergantungan, 2018-2022	11
Gambar 1.5 Persentase Wanita yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama, 2022	13
Gambar 1.6 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2022	14
Gambar 2.1 Usia Harapan Hidup Saat Lahir (tahun), 2020–2022	18
Gambar 2.2 Persentase Tingkat Morbiditas Penduduk Kabupaten Majalengka pada Sebulan Terakhir, 2019-2022	19
Gambar 2.3 Persentase Penduduk Umur 0-59 bulan yang pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Majalengka, 2019-2022	20
Gambar 2.4 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Menurut Tempat Melahirkan di Kabupaten Majalengka, 2022	21
Gambar 3.1 Harapan Lama Sekolah/HLS dan Rata-rata Lama Sekolah/RLS (tahun), 2018-2022	29
Gambar 3.2 Harapan Lama Sekolah /HLS dan Rata-rata Lama Sekolah/RLS (tahun), 2018–2022	30

Daftar Gambar

- 41** Gambar 4.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja di Kabupaten Majalengka, 2018-2022
- 42** Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Bekerja di Kabupaten Majalengka, 2018–2022
- 43** Gambar 4.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2018-2022
- 44** Gambar 4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin, 2018-2022
- 45** Gambar 4.5 Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan di Kabupaten Majalengka, 2018-2022
- 48** Gambar 4.6 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018-2022
- 49** Gambar 4.7 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Majalengka, 2018 - 2022
- 55** Gambar 5.1 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran, 2022

Daftar Gambar

Gambar 7.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 2014–2022	69
Gambar 7.2 Garis Kemiskinan, 2014–2022 (Rupiah/Kapita/Bulan)	71
Gambar 7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), 2014–2022	72
Gambar 7.4 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), 2014–2022	72
Gambar 7.5 Persentase Penduduk Miskin Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2018–2022	73
Gambar 7.6 Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja (dalam persen), 2018–2022	75
Gambar 7.7 Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja dan Bidang Pekerjaan (dalam persen), 2018–2022	76

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka	89
Lampiran 2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022	90
Lampiran 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Majalengka Tahun 2022	91
Lampiran 4. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin, 2022	92
Lampiran 5. Luas Wilayah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Majalengka, 2022	93
Lampiran 6. Indeks Pembangunan Manusia serta Komponennya 2020-2022	94
Lampiran 7. Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Seminggu Lalu di Kabupaten Majalengka, 2018-2022	95
Lampiran 8. Penduduk Laki-laki 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Seminggu Lalu di Kabupaten Majalengka, 2018-2022	96
Lampiran 9. Penduduk Perempuan 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Seminggu Lalu di Kabupaten Majalengka, 2018-2022	97
Lampiran 10. Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Majalengka, 2010-2022	98

KEPENDUDUKAN 2022

JUMLAH PENDUDUK
TAHUN 2022

1.335.460

JIWA

JUMLAH PENDUDUK

2010



1,153
JUTA JIWA

2020



1,305
JUTA JIWA

2022



1,335
JUTA JIWA

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

2010 ---- 0,40

2020 ---- 1,25

2022 ---- 1,31



RASIO JENIS KELAMIN



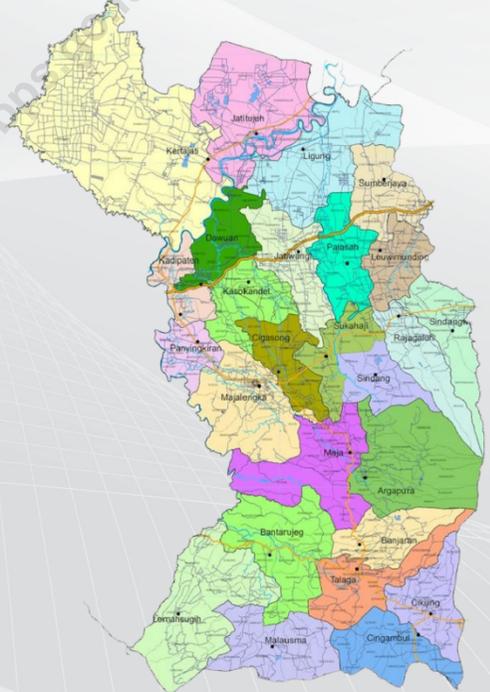
101,0



671.015
JIWA



664.445
JIWA

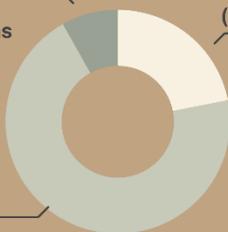


KOMPOSISI PENDUDUK

Usia 65 Tahun keatas
(8,54%)

Usia 15 - 64 Tahun
(69,88%)

Usia 0 - 14 Tahun
(21,57%)



DEPENDENCY RATIO/
ANGKA KETERGANTUNGAN

43,17

SUMBER : SENSUS PENDUDUK 2020 & SUSENAS 2022

Follow us :

1. KEPENDUDUKAN



Definisi penduduk menurut Badan Pusat Statistik adalah semua orang yang bedomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sementara itu, menurut Undang- Undang No. 23 Tahun 2006, kependudukan didefinisikan sebagai hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, kondisi kesejahteraan penduduk, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa penduduk merupakan aset pembangunan yang sangat potensial bagi suatu wilayah pemerintahan serta mempunyai kedudukan yang sangat vital, karena selain berkaitan dengan dinamika penduduknya sendiri juga akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bernegara secara luas. Dalam hal ini penduduk berfungsi sebagai pelaku dan sasaran pembangunan, sekaligus juga yang menikmati hasil pembangunan namun pada sisi lain bila tidak dikelola dan diberdayakan dengan baik akan menjadi masalah dan menjadi kendala pembangunan suatu negara.

Isu permasalahan yang berkaitan dengan penduduk merupakan tugas besar dari semua pihak khususnya pemerintah untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tepat dalam mengatasinya. Masalah kependudukan adalah salah satu masalah krusial yang mengakibatkan efek domino terhadap permasalahan lain yaitu lingkungan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perkembangan penduduk diarahkan pada pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas,

serta penerahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang menguntungkan pembangunan suatu daerah .

1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam hal kependudukan, karena jumlah penduduk Indonesia merupakan penduduk terbesar di kawasan ASEAN dan merupakan urutan empat terbesar di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat

Semakin meningkatnya jumlah penduduk akan mempunyai dampak baik sosial maupun ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini dibutuhkan solusi yang komprehensif untuk penyelesaian terhadap berbagai masalah kependudukan yang kompleksitasnya semakin meningkat dari tahun ke tahun .

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
di Kabupaten Majalengka, 2022

Uraian	Satuan	SP 2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Penduduk	Jiwa	1.305.476	1.318.965	1.335.460
▪ Laki-laki	Jiwa	656.386	662.951	671.015
▪ Perempuan	Jiwa	649.090	656.014	664.445
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,10	1,38	1,31

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Sensus Penduduk 2020 & Angka Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan Tahun/Juni)

Berdasarkan tabel hasil Sensus Penduduk 2020 dan angka proyeksi penduduk diatas, jumlah penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 mengalami peningkatan atau bertambah sebanyak 16.495 jiwa dibandingkan

tahun sebelumnya. Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka, perlu dibarengi dengan adanya peningkatan pelayanan pemerintah di infrastruktur penunjang, seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, perumahan dan infrastruktur penunjang lainnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi dampak sosial yang buruk dari bertambahnya jumlah penduduk dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari Tabel 1.1. juga bisa terlihat bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pun mengalami peningkatan. LPP pada tahun 2022 mencapai angka 1,31 poin, lebih tinggi dari tahun 2020 dimana LPP tercatat hanya 1,10 poin. Apabila dilihat besarnya, LPP Kabupaten Majalengka mengalami kenaikan yang cenderung moderat dan tergolong pada daerah dengan kategori laju pertumbuhan penduduk sedang.

Faktor yang mempengaruhi kenaikan laju pertumbuhan penduduk diantaranya adalah faktor migrasi, diduga faktor migrasi masuk ke Kabupaten Majalengka terjadi cukup tinggi sehingga laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang signifikan. Pembangunan proyek-proyek strategis nasional di Kabupaten Majalengka, mampu memberikan efek domino berupa meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Tumbuhnya pusat-pusat industri di Kabupaten Majalengka menjadi faktor penarik (*pull factor*) bagi para pendatang untuk mengadu nasib dan menetap di Majalengka.. Disamping itu, migrasi penduduk keluar dari Majalengka dapat ditekan karena penduduk Majalengka pencari kerja tidak perlu merantau keluar kota untuk mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak. Faktor lain yang diperkirakan mampu menekan angka migrasi keluar penduduk Majalengka adalah adanya peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang semakin baik dan merata mampu mengurangi migrasi keluar para pelajar/mahasiswa dari Majalengka.

Diperlukan kebijakan dan regulasi yang komprehensif sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat terkendali sehingga diharapkan hasil-hasil pembangunan akan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Majalengka.

1.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Disamping jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, persoalan lain yang terkait dengan dengan kependudukan adalah sebaran penduduk dan kepadatan penduduk yang tidak merata. Sebaran penduduk dan kepadatan penduduk yang tidak merata adalah masalah klasik yang banyak dihadapi oleh negara dunia ketiga atau negara berkembang. Menurut beberapa referensi pustaka, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebaran penduduk diantaranya ketersediaan lapangan kerja, kesuburan tanah, ketersediaan sumber air, topografi wilayah yang datar serta sarana transportasi yang baik.

Wilayah utara dan tengah Kabupaten Majalengka memiliki kontur topografi yang datar, dekat dengan pusat layanan kesehatan dan pemerintahan, memiliki infrastruktur transportasi yang baik serta merupakan pusat pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut menjadikan sebagian besar penduduk Majalengka terkonsentrasi di wilayah utara dan tengah. Peringkat 3 (tiga) besar wilayah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Majalengka yaitu Kecamatan Jatiwangi (91.808 jiwa), Kecamatan Majalengka (73.948 jiwa) dan Kecamatan Cikijing (69.165 jiwa) tersebar di bagian utara, selatan dan tengah Majalengka. Sementara itu, wilayah selatan Kabupaten Majalengka yang memiliki kontur topografi yang berbukit-bukit dengan ketinggian antara 300-1.000 mdpl, jumlah penduduknya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah utara. Hanya Lemahsugih dan Cikijing yang memiliki jumlah penduduk

lebih dari 60.000 jiwa. Informasi lengkap terkait sebaran penduduk di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada Tabel 1.2. di bawah.

Tabel 1.2
Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Majalengka, 2022

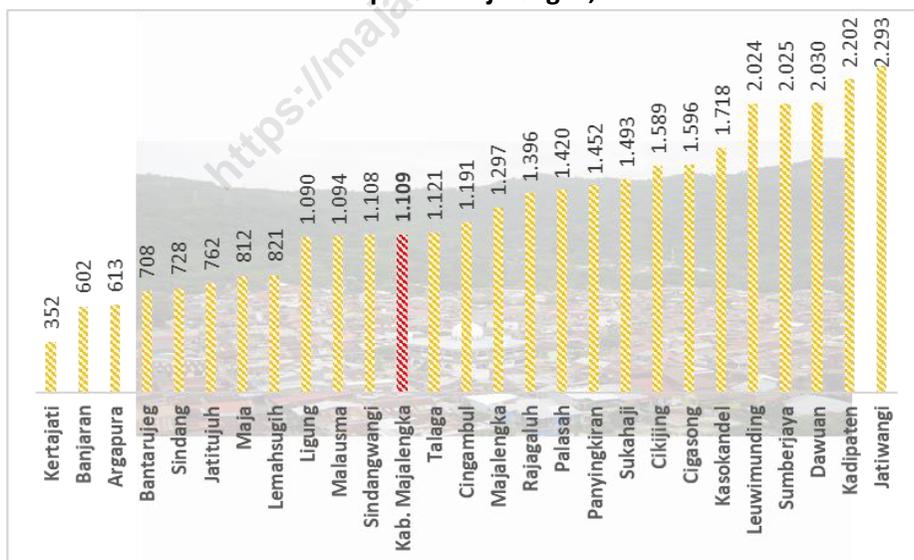
Nama Kecamatan		Jumlah Penduduk Total (Jiwa)	Persentase Jumlah Penduduk (%)
(1)	(2)	(3)	(5)
010	Lemahsugih	64.546	4,83
020	Bantarujeg	47.069	3,52
021	Malausma	49.275	3,69
030	Cikijing	69.165	5,18
031	Cingambul	44.117	3,30
040	Talaga	48.747	3,65
041	Banjaran	25.256	1,89
050	Argapura	37.112	2,78
060	Maja	52.957	3,97
070	Majalengka	73.948	5,54
080	Cigasong	38.582	2,89
090	Sukahaji	48.557	3,64
091	Sindang	17.458	1,31
100	Rajagaluh	47.990	3,59
110	Sindangwangi	35.181	2,63
120	Leuwimunding	65.704	4,92
130	Palasah	54.932	4,11
140	Jatiwangi	91.808	6,87
150	Dawuan	48.304	3,62
151	Kasokandel	54.313	4,07
160	Panyingkiran	33.357	2,50
170	Kadipaten	48.136	3,60
180	Kertajati	48.720	3,65
190	Jatitujuh	56.115	4,20
200	Ligung	67.826	5,06
210	Sumberjaya	66.285	4,96
KABUPATEN MAJALENGKA		1.335.460	100

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Angka Proyeksi Penduduk Interim

Dari tabel 1.2. diatas, dapat terlihat bahwa dari 1,33 juta jiwa jumlah penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2022, wilayah dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Jatiwangi sebanyak 91.808 jiwa, sementara wilayah dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Sindang sebanyak 17.458 jiwa.

Secara umum Kabupaten Majalengka memiliki kepadatan penduduk yang terbilang rendah yaitu hanya 1.109 jiwa per km², hal tersebut terjadi karena sebagian besar wilayahnya masih didominasi dengan wilayah perdesaan serta masih banyak lahan yang belum menjadi permukiman. Dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka, 8 (delapan) kecamatan di antaranya memiliki tingkat kepadatan penduduk di bawah 1.000 jiwa per km².

Gambar 1.1
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²) Menurut Kecamatan
di Kabupaten Majalengka, 2022



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Angka Proyeksi Penduduk Interim

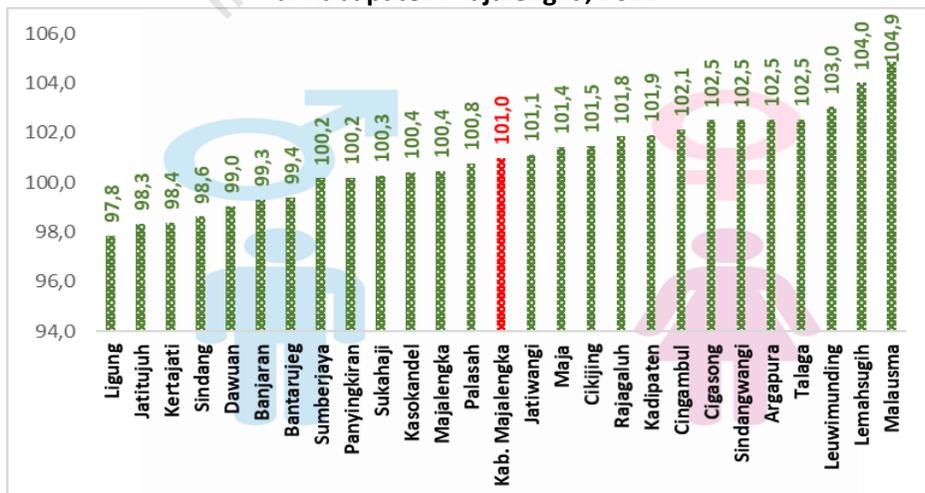
Jika ditinjau dari kepadatan penduduk per kecamatan, pada Gambar 1.1 terlihat beberapa kecamatan yang berada di wilayah tengah dan utara

mempunyai kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah kecamatan yang berada di wilayah selatan, dengan kepadatan penduduk di atas 1.400 jiwa per km². Kecamatan Jatiwangi, Kadipaten dan Dawuan merupakan 3 Kecamatan dengan tingkat kepadatan masing-masing mencapai 2.293 jiwa per km², 2.202 jiwa per km² dan 2.030 jiwa per km².

1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) dan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang sangat penting. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah, sedangkan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) menunjukkan berapa tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Gambar 1.2
Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut Kecamatan di Kabupaten Majalengka, 2022

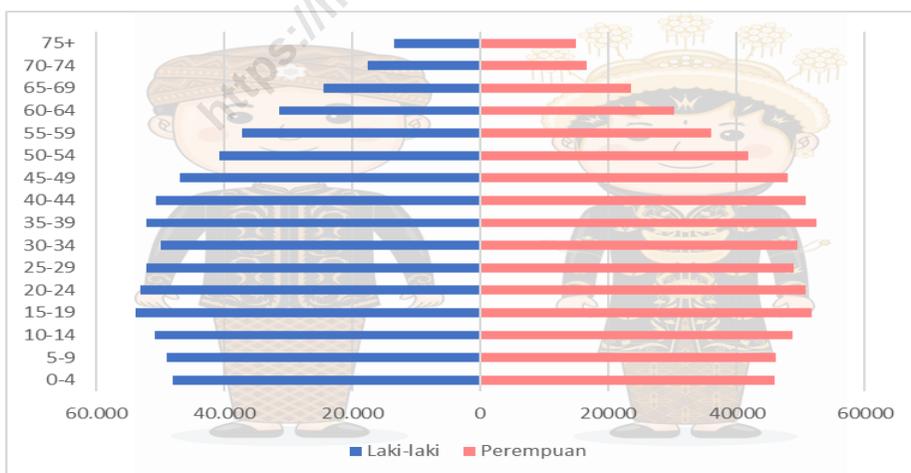


Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Angka Proyeksi Penduduk

Berdasarkan Gambar 1.2, komposisi penduduk Kabupaten Majalengka jika dilihat dari rasio jenis kelamin, pada tahun 2022 sebesar 101. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 101 penduduk laki-laki, atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Untuk unit analisis yang lebih kecil, yaitu rasio jenis kelamin per kecamatan di Kabupaten Majalengka, maka dari 26 kecamatan terdapat 7 (tujuh) kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 100, yaitu Kecamatan Ligung dengan rasio jenis kelamin sebesar 97,8 kemudian diikuti oleh Jatitujuh (98,3), Kertajati (98,4), Sindang (98,6), Dawuan (99,0), Banjaran (99,3), dan Bantarujeg (99,4). Hal ini mengindikasikan bahwa di 7 (tujuh) kecamatan tersebut jumlah penduduk perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Gambar 1.3
Piramida Penduduk Kabupaten Majalengka, 2022



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Angka Proyeksi Penduduk

Jika dilihat komposisi berdasarkan kelompok umur (Gambar 1.3.), maka median umur penduduk Kabupaten Majalengka tahun 2022 termasuk

median umur penduduk tua, yaitu median umur penduduk Kabupaten Majalengka berada di usia >30 tahun. Sedangkan apabila dilakukan analisis sederhana, dapat terlihat bahwa komposisi kelompok umur anak (0-14 tahun) sekitar 21,57 persen, komposisi kelompok umur produktif (15-64 tahun) sekitar 69,88 persen, dan komposisi umur tua (65+ tahun) sekitar 8,54 persen. Mengacu pada data tersebut, dimana komposisi penduduk umur produktif mencapai 69,88 persen, maka dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Majalengka cukup potensial dalam upaya mendukung dan mensukseskan pembangunan daerah.

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) tidak hanya digunakan untuk melihat seberapa besar beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif tetapi juga dijadikan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin rendah angka beban ketergantungan menunjukkan semakin kecil beban negara untuk mensubsidi penduduk non produktif, begitu pula sebaliknya.

Gambar 1.4
Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kabupaten Majalengka, 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Angka Proyeksi Penduduk Interim

Pada gambar 1.4 memperlihatkan bahwa angka beban ketergantungan di Kabupaten Majalengka selama 6 (enam) tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Diawal tahun 2018, angka beban ketergantungan penduduk di Kabupaten Majalengka berada pada angka 48,21 di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 43,17. Angka ini mengindikasikan bahwa dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 43 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin besar angka beban ketergantungan maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif dan semakin besar pula upaya dan hambatan yang harus dilakukan dan ditangani oleh pemerintah daerah setempat.

1.4 Perempuan Menurut Usia Kawin Pertama

Usia kawin pertama bisa dijadikan salah satu pemicu pertambahan jumlah penduduk, semakin panjang masa reproduksi seorang wanita semakin banyak kemungkinan anak yang bisa dilahirkan. Menurut UU Perkawinan 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun, dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun. Jika menikah dibawah usia 21 tahun harus disertai dengan ijin kedua atau salah satu orangtua atau yang ditunjuk sebagai wali (pasal 6 ayat 2).

Sedangkan menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi remaja saat ini idealnya 21 hingga 25 tahun. Pada usia itu, remaja sudah tumbuh pengetahuan dan kesadaran dalam pengelolaan kesehatan reproduksi. Hal itu berpengaruh terhadap kesehatan pasangan maupun anak dari pasangan muda itu, jadi di masa mendatang usia menikah pertama diharapkan pada usia dewasa.

Gambar 1.5
Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Menurut
Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Majalengka, 2022



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat, 2022

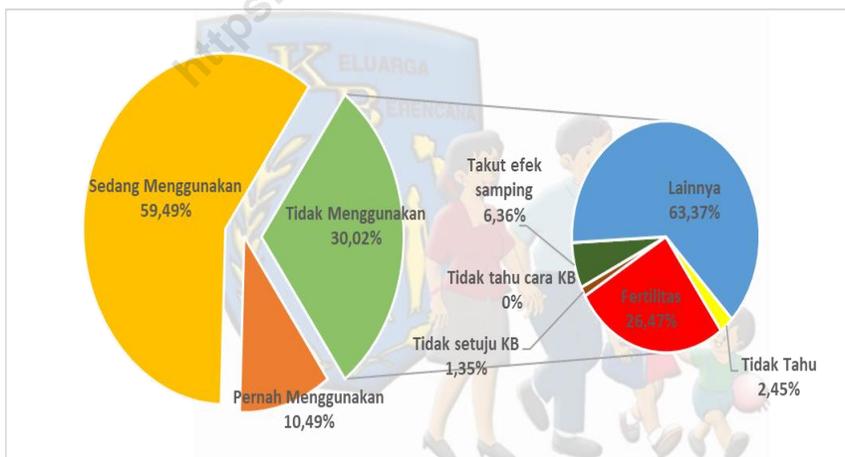
Berdasarkan Gambar 1.5, sebagian besar wanita di Kabupaten Majalengka melakukan perkawinan pertamanya pada usia kurang dari 19 tahun, total sebesar 54,73 persen. Sisanya, 45,27 persen wanita di Kabupaten Majalengka melakukan pernikahan pertamanya pada usia ideal 19 tahun atau lebih. Dari variabel ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Majalengka, persentase perkawinan usia dini masih sangat tinggi. Makin muda usia perkawinan, maka semakin panjang masa reproduksi sehingga bisa mengakibatkan tingkat kelahiran semakin tinggi, dan pertumbuhan penduduk akan melonjak dan sulit terkontrol. Disamping itu, dipandang dari sisi medis, menikah pada usia relatif muda akan beresiko tinggi terhadap kematian pada proses kehamilan dan persalinan baik bagi ibu maupun bayi. *Stake holder* terkait perlu lebih ekstra dalam meningkatkan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan hal ini.

1.5 Penggunaan Alat/Cara KB

Pemerintah saat ini sudah menggalakkan kembali program KB (Keluarga Berencana). Program ini tidak hanya bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui kelahiran, tetapi juga bisa meningkatkan kualitas kesehatan ibu serta mewujudkan bonus demografi yang berkualitas.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2022 di Kabupaten Majalengka, perempuan berumur 15-49 tahun pernah kawin yang sedang menggunakan alat kontrasepsi KB sebesar 59,49 persen. pernah menggunakan alat/cara KB sebanyak 10,49 persen dan yang tidak pernah menggunakan alat/cara KB sebesar 30,02 persen. Penggunaan alat KB menggunakan suntik paling banyak diminati oleh peserta KB, kemudian alat KB pil juga sangat diminati oleh peserta KB di Kabupaten Majalengka.

Gambar 1.6
Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2022



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat, 2022

KESEHATAN 2022

UMUR HARAPAN HIDUP



Umur Harapan Hidup saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat

Umur Harapan Hidup (UHH) tahun 2022 mencapai 74,44 Tahun



TINGKAT MORBIDITAS

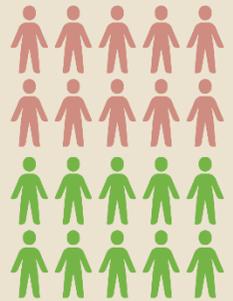


Semakin tinggi tingkat morbiditas atau semakin banyak penduduk yang mengalami sakit, hal ini mengindikasikan semakin rendah derajat kesehatan pada wilayah tersebut

TEMPAT BEROBAT PALING DIMINATI

Hampir separuh penduduk Majalengka memilih praktek dokter/bidan sebagai tempat berobat jalan dikala sakit

47,42
PERSEN



TEMPAT MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP TERAKHIR



Fasilitas Kesehatan

91,8
PERSEN



Rumah

8,2
PERSEN



SUMBER : SUSENAS 2022

Follow us :

2. KESEHATAN



Derajat kesehatan masyarakat (*public health level*) merupakan salah satu indikator terpenting dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan mutu pembangunan manusia (*human development*) di suatu wilayah. Tujuan pembangunan manusia di bidang kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat untuk setiap penduduk, sehingga tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat, pemerintah dan swasta secara bersama-sama. Semakin baik kondisi kesehatan masyarakat di suatu wilayah akan mendorong akselerasi proses dan dinamika pembangunan ekonomi, khususnya dalam peningkatan produktivitas kerja.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, sudah melakukan berbagai intervensi program kebijakan di bidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, seperti dengan meningkatkan persentase masyarakat yang memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan pertama melalui pemberian iuran BPJS gratis bagi masyarakat kurang mampu. Membangun fasilitas kesehatan masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya. Menambah jumlah tenaga kesehatan. Selain itu, pemerintah juga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menikmati pelayanan kesehatan.

Keberhasilan program-program pemerintah dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan berbagai indikator kesehatan seperti Umur Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Angka Kesakitan, prevalensi Balita Kurang Gizi dan indikator-indikator yang lain yang berkaitan dengan tenaga medis dan fasilitas kesehatan, serta pengerahan mobilitas

sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang menguntungkan pembangunan suatu daerah.

2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Dimensi kesehatan bisa dilihat dari Umur Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Selama kurun waktu 6 (enam) tahun dari 2014 hingga 2021 pemerintah daerah Kabupaten Majalengka telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir sebesar 1,80 tahun. Pada tahun 2014, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Majalengka hanya sebesar 68,66 tahun sedangkan pada tahun 2021 telah mencapai 70,46 tahun. Semakin meningkatnya angka harapan hidup mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Majalengka mengalami usia yang lebih panjang dari tahun ke tahun.

Peningkatan angka harapan hidup sangat dipengaruhi banyak faktor, seperti semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Gambar 2.1
Usia Harapan Hidup Saat Lahir Penduduk Kabupaten Majalengka (tahun), 2020–2022

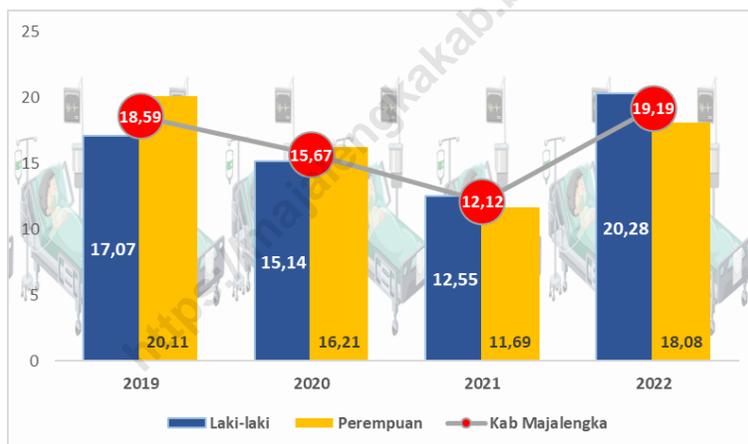


Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, IPM Majalengka Tahun 2020-2022

2.2 Tingkat Morbiditas

Morbiditas atau tingkat kesakitan adalah salah satu indikator menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Jika persentase tingkat morbiditas semakin tinggi atau banyak penduduk yang mengalami sakit, hal ini mengindikasikan semakin rendah derajat kesehatan pada wilayah tersebut. Begitu pula sebaliknya.

Gambar 2.2 Persentase Tingkat Morbiditas/Angka Kesakitan Penduduk Kabupaten Majalengka pada Sebulan Terakhir (persen), 2019-2022



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019-2022

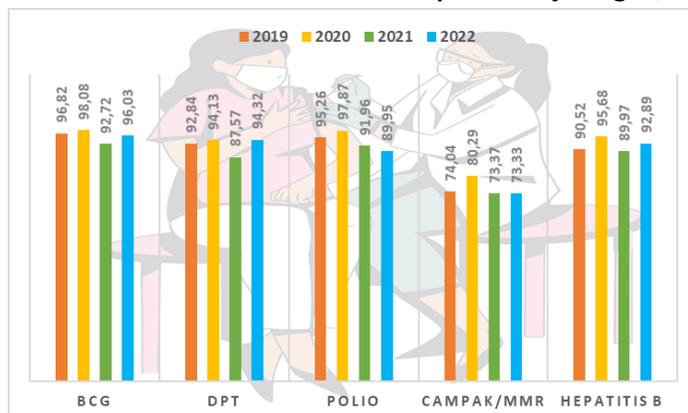
Selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2019-2022) terlihat pada Gambar 2.2 bahwa tingkat morbiditas di Kabupaten Majalengka cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di tahun 2019 tingkat morbiditas tercatat masih di angka 18,59 persen, kemudian turun hingga menjadi 12,12 persen di tahun 2021. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

2.3 Tingkat Imunitas Balita

Imunisasi merupakan pemberian sistem kekebalan tubuh anak agar kuat terhadap suatu wabah penyakit, jenis imunisasi ada dua macam yaitu kekebalan tubuh yang sudah ada pada diri anak yang merupakan bawaan sejak lahir dan kekebalan yang diberikan kepada anak seperti pemberian vaksin bisa melalui suntik maupun tetes. Di Indonesia imunisasi ada yang wajib dan juga ada yang dianjurkan, imunisasi wajib seperti BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B. Sedangkan beberapa imunisasi yang dianjurkan seperti typhus, influenza, MMR dan masih banyak jenis imunisasi lainnya.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Majalengka yang bersumber dari pendataan Susenas Tahun 2021, capaian imunisasi wajib bagi balita usia 0-59 bulan masih perlu di optimalkan. Sebanyak 92,72 persen balita pernah mendapatkan imunisasi wajib BCG, hal ini terlihat dari Gambar 2.2. Kemudian ada 87,57 persen balita usia 0-59 bulan pernah mendapat imunisasi DPT. Dari 5 (lima) jenis imunisasi wajib bagi balita, capaian persentase balita yang pernah mendapat imunisasi campak merupakan capaian terkecil, yaitu 73,37 persen.

Gambar 2.3
Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Majalengka, 2019-2022

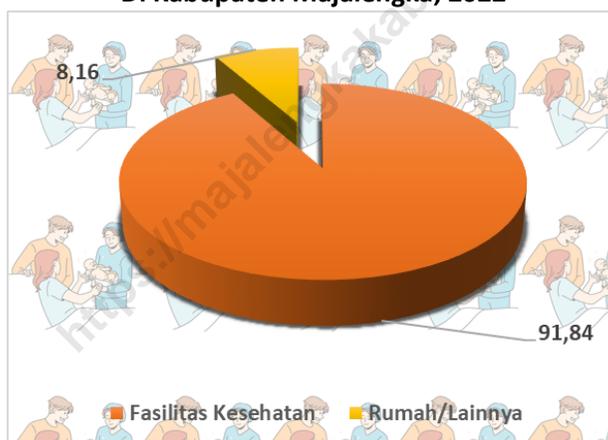


Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019-2022

2.4 Pemanfaatan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, keberadaan dan keberfungsian fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sangatlah penting. Tenaga medis yang handal dan fasilitas kesehatan yang lengkap sangat penting yang bisa mempengaruhi keselamatan ibu dan bayi. Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya melalui berbagai program-program kesehatan salah satunya melalui perbaikan fasilitas kesehatan seperti yang tercantum pada Perpres No 5 tahun 2010.

Gambar 2.4
Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 tahun terakhir Menurut Tempat Melahirkan Di Kabupaten Majalengka, 2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022

Berdasarkan pendataan Susenas Tahun 2022 diketahui bahwa ada 91,84 persen perempuan umur 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan disini meliputi RS pemerintah, RS swasta, Praktek Dokter/Bidan, Puskesmas dan UKBM. Sementara itu sisanya, atau sekitar 8,16 persen perempuan melahirkan di bukan fasilitas kesehatan. Resiko kematian ibu dan bayi saat melahirkan akan meningkat ketika proses persalinan tidak dilakukan di fasilitas kesehatan karena keterbatasan alat

medis penolong persalinan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah untuk *stake holder* terkait. Diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih masif dari pihak-pihak terkait agar masyarakat lebih *aware* terhadap keselamatan ibu dan bayi saat proses persalinan.

Kemudian, jika dilihat dari tenaga penolong proses persalinannya, penduduk perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin paling banyak dibantu oleh tenaga medis kesehatan, hampir mendekati angka 100 persen. Di tahun 2020 tercatat 97,17 persen proses persalinan di bantu oleh tenaga kesehatan, sedangkan di tahun 2022 seluruh persalinan sudah dibantu oleh nakes. Masih ada penduduk yang proses persalinannya dibantu oleh bukan tenaga kesehatan tapi persentasenya relatif kecil. Lebih lengkap bisa dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2020–2022

PENOLONG PERSALINAN	TAHUN		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Tenaga Kesehatan (Tenaga Medis, Bidan/Perawat)	97,17	98,80	100,00
Bukan Tenaga Kesehatan	2,83	1,20	0,00
TOTAL	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020-2022

Analisis sederhana dari data yang tercatat pada Tabel 2.1 dapat terlihat bahwa pada tahun 2020 - 2021 masih ada perempuan yang proses persalinannya belum dibantu oleh tenaga kesehatan, walaupun persentasenya cukup kecil yaitu hanya sekitar 1-3 persen. Berdasarkan beberapa penelitian, ada beberapa faktor penyebab masih adanya perempuan hamil yang memilih penolong persalinan tenaga non medis. Faktor sosial

budaya, biaya mahal, jarak yang jauh dan transportasi yang sulit adalah beberapa faktor utama yang mendorong seorang perempuan hamil memilih penolong persalinan pada tenaga non medis.

Hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan tidak hanya penolong persalinan, tetapi juga fasilitas tempat berobat. Pemanfaatan fasilitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal. Jarak rumah ke tempat berobat sangat mempengaruhi dalam menentukan pilihan dimana mereka akan berobat.

Berdasarkan data Susenas 2022, ada beberapa tempat berobat yang jadi pilihan masyarakat untuk berobat jalan selama sebulan terakhir, seperti rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, praktek dokter/bidan, klinik, Puskesmas, UKBM, dan praktek pengobatan tradisional. Dari beberapa tempat berobat tersebut, di Kabupaten Majalengka persentase terbesar penduduk berobat di praktek dokter/bidan yaitu sebesar 49,50 persen, kemudian diikuti oleh Klinik/Praktek Dokter Bersama dan Puskesmas, masing-masing sebesar 22,69 persen dan 17,40 persen.

Tabel 2.2.
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat Jalan di Kabupaten Majalengka, 2020–2022

Tempat Berobat Jalan	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit Pemerintah	7,39	5,47	6,16
RS Swasta	2,73	4,87	1,50
Praktek Dokter/Bidan	56,45	49,50	47,42
Klinik/Praktek Dokter Bersama	18,42	22,69	20,13
Puskesmas	17,69	17,40	18,30
UKBM	1,38	1,58	0,00
Pengobatan Tradisional	1,25	1,78	3,11
Lainnya	0,93	3,55	7,68

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020-2022

PENDIDIKAN 2022

HARAPAN LAMA SEKOLAH



12,24 TAHUN

7,49 TAHUN



RATA-RATA LAMA SEKOLAH

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH



7 - 12 TAHUN

98,72
PERSEN

13 - 15 TAHUN

92,18
PERSEN

16 - 18 TAHUN

76,63
PERSEN

TAMAT
SD



39,17
PERSEN

TAMAT
SMP



23,39
PERSEN

TAMAT
SMA KE ATAS



26,79
PERSEN



PENDIDIKAN TERTINGGI

SUMBER : SUSNAS 2022

Follow us :

3. PENDIDIKAN



Memasuki era revolusi industri 4.0 dan globalisasi modern ini, peran manusia di berbagai perikehidupan mulai bergeser. Peran manusia lambat laun mulai tergantikan oleh mesin yang bernama robot. Lapangan kerja akan berkurang signifikan. Kondisi ini akan berakibat buruk bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk menghadapi kondisi persaingan tersebut, masyarakat dituntut untuk selalu mengembangkan diri beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Rumusan tentang pendidikan, lebih jauh termuat dalam UU. No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, arah dari proses pendidikan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat untuk *survive* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang ada antara lain harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi sekolah.

Di tahun 2020, dunia pendidikan terkena imbas dari pandemi virus covid-19. Pemerintah mengambil kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Aktivitas belajar mengajar, aktivitas keagamaan, aktivitas pekerjaan dan aktivitas lainnya sangat dibatasi dan diminimalisir. Kegiatan pembelajaran di kelas yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka, di ganti menjadi pertemuan secara daring (*online*). Belajar dari rumah (BDR) menggunakan akses internet menjadi opsi yang dipilih oleh pemerintah.

3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis

Kemampuan membaca dan menulis sangat penting karena dapat mencerdaskan intelektual, spiritual, emosional, dan kepercayaan. Membaca akan membuka peluang untuk menyerap sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan dan memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan membaca dan menulis juga bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan kreatif, kritis, analitis dan imajinatif sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.

Secara umum kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Majalengka sudah cukup baik, hal ini terlihat dari persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis huruf latin pada tahun 2018 sampai dengan 2022 persentasenya relatif stabil pada kisaran angka diatas 95 persen. Bisa simpulkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, hampir semua penduduk Kabupaten Majalengka sudah mampu membaca dan menulis huruf latin.

Tabel 3.1
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Kemampuan Membaca Dan Menulis di Kabupaten Majalengka, 2018–2022

Tahun	Laki-laki			Perempuan		
	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
2018	98,93	56,96	1,90	97,19	53,24	1,39
2019	99,60	61,90	1,92	97,36	56,87	1,86
2020	99,50	56,31	1,65	98,31	54,17	1,34
2021	98,47	40,55	1,83	95,72	39,28	0,64
2022	98,43	66,73	2,20	97,49	66,23	1,68

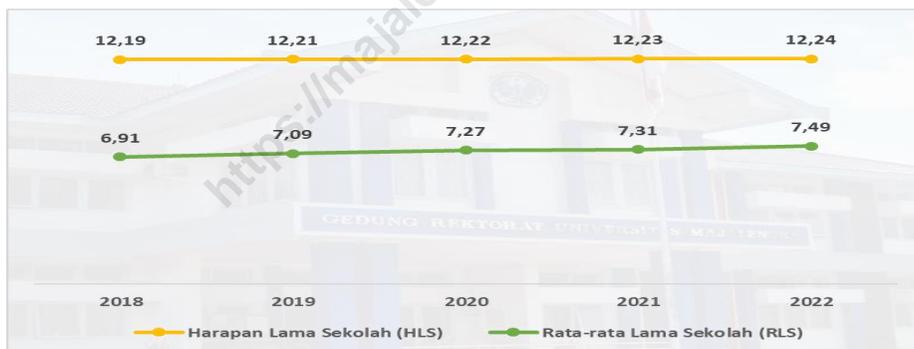
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Susenas 2018–2022

Merujuk pada data di Tabel 3.1, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2022 persentase penduduk laki-laki yang berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis sedikit lebih besar dari pada perempuan, penduduk laki-laki yang bisa membaca dan menulis sebesar 98,43 persen dan perempuan sebesar 97,49 persen.

3.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Gambar 3.1.
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Majalengka (dalam tahun), 2018–2022



Sumber : BPS Kab Majalengka, Indeks Pembangunan Manusia 2018–2022

3.2.1 Harapan Lama Sekolah

Selama periode 2018 hingga 2022, Harapan Lama Sekolah terus mengalami kenaikan. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah dapat diartikan bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2022, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Majalengka telah mencapai 12,24 yang berarti

bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

3.2.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk di suatu wilayah. Indikator ini merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Majalengka tumbuh terus mengalami kenaikan tiap tahunnya selama periode 2018 hingga 2022. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Majalengka yang lebih baik. Hingga tahun 2020, secara rata-rata penduduk Kabupaten Majalengka usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan selama 7,49 tahun atau setara kelas VIII SMP (Gambar3.2).

3.3 Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sangat penting bagi kesiapan bangsa menghadapi tantangan global di masa depan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kemampuan, keahlian dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan melalui tingkat pendidikan.

Secara umum tingkat Pendidikan di Kabupaten Majalengka tidak terlalu tinggi. Persentase penduduk Kabupaten Majalengka usia 15 tahun keatas yang tidak mempunyai ijazah SD sebanyak 10,65 persen, tamat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat sebesar 39,17 persen, tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP)

atau sederajat sebesar 23,39 persen. Berdasarkan data faktual diatas, maka mayoritas penduduk Kabupaten Majalengka usia 15 tahun ke atas sebagian besar tamatan SMP ke bawah, dengan persentase 73,21. Lebih lengkap bisa dilihat pada Tabel 3.2 di bawah.

Tabel 3.2.
Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Majalengka, 2022

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Punya Ijazah SD	8,65	12,65	10,65
SD/sederajat	38,96	39,38	39,17
SMP/sederajat	23,47	23,31	23,39
SMA/sederajat ke atas	28,92	24,66	26,79
TOTAL	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022

3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan di suatu wilayah akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi. Penduduk yang memiliki kualifikasi seperti tersebut akan menjadi *engine of growth* atau mesin/lokomotif pembangunan yang mampu menggerakkan berbagai sektor pembangunan. Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam memberikan akses yang cukup terhadap fasilitas pendidikan kepada penduduknya dapat terlihat dari angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu : (a) angka partisipasi sekolah/ APS; (b) angka partisipasi murni/APM; dan (c) angka partisipasi kasar/APK.

Tabel 3.3
Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Murni (APM) serta Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Non Formal Penduduk Menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Majalengka, 2022

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Partisipasi Sekolah			
7 – 12 tahun	98,13	99,38	98,72
13 – 15 tahun	92,06	92,32	92,18
16 – 18 tahun	75,61	77,93	76,63
Angka Partisipasi Murni			
SD	96,52	97,59	97,03
SMP	87,18	74,54	81,16
SMA	68,65	61,91	65,69
Angka Partisipasi Kasar			
SD	103,43	104,69	104,03
SMP	95,29	86,71	91,20
SMA	68,65	82,23	74,65

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022

Berdasarkan data hasil Susenas Maret 2022, diketahui capaian angka partisipasi sekolah untuk umur 7-12 tahun mencapai 98,72 persen. APS untuk penduduk usia 13-15 tahun besarnya mencapai 92,18 persen. Capaian ini memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dasar sudah cukup baik. Sayangnya, pada pendidikan menengah angka partisipasi sekolahnya masih tergolong rendah, APS penduduk umur 16-18 hanya berada pada 76,63 persen. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan APS pendidikan menengah diantaranya : (1) pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan berdasarkan kebutuhan wilayah; (2) mengintensifkan edukasi dan sosialisasi terkait pemahaman wajib belajar 12 terhadap masyarakat; serta (3) memperbesar porsi dan optimalisasi anggaran pendidikan menengah, jika memungkinkan menyelenggarakan program

sekolah gratis sampai tingkat SMA. Pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk menyusun formulasi program dan strategi yang tepat dalam rangka meningkatkan capaian angka partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan menengah.

3.5 Pendidikan Usia Dini

Dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini ialah suatu upaya pembinaan yang di tujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang di lakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesempatan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Secara sederhana pendidikan anak usia dini dapat di definisikan sebagai pendidikan yang di berikan kepada anak yang berada pada usia 0-6 atau 8 tahun. Menurut pakar pendidikan, pendidikan anak usia dini ialah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak usia lahir hingga enam tahun secara menyeluruh, yang mencakup aspek fisik, tumbuh dan nonfisik , dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia dan jenis layanannya, yang meliputi : a). Layanan PAUD untuk usia sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan yang sederajat; b). Layanan PAUD untuk usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun terdiri atas Kelompok Bermain (KB) dan yang sejenisnya; c). Layanan PAUD untuk usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), dan yang sederajat.

Tabel 3.4
Persentase Penduduk Laki Laki dan Perempuan Berumur 0-6 Tahun
Menurut Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah, 2022

Jenis Kelamin	Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah			Jumlah
	Masih Pra Sekolah Tahun ajaran 2021/2022	Pernah mengikuti Pra Sekolah TA 2021/2022 dan sebelum TA 2021/2022	Tidak/belum pernah mengikuti Pra Sekolah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki	16,65	9,37	73,98	100,00
Perempuan	18,12	7,97	73,91	100,00
Laki-laki+Perempuan	17,40	8,65	73,95	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Susenas 2022

Tabel 3.4 memperlihatkan bahwa di Kabupaten Majalengka terdapat 73,95 persen penduduk usia 0-6 tahun yang tidak/belum pernah mengikuti pra sekolah, sedangkan selebihnya yaitu 8,65 persen pernah mengikuti pra sekolah dan 17,40 persen masih mengikuti pendidikan pra sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan pra sekolah masih cukup rendah, atau kemungkinan bahwa mereka mengikuti pendidikan pra sekolah pada usia di atas 6 tahun. Sedangkan jika dilihat dari jenis kelaminnya mereka yang masih mengikuti pendidikan pra sekolah, perempuan lebih tinggi capaiannya yaitu 18,12 persen sedangkan laki laki hanya 16,65 persen.

3.5.1 Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan

komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Tabel 3.5
Persentase Penduduk Berumur 0-6 tahun yang pernah/masih mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah dan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Majalengka, Tahun Ajaran 2021/2022

Jenis Kelamin	Jenis Pendidikan Pra Sekolah				Jumlah
	TK	Bustanul Athfal	PAUD	Lainnya (Kober/TPA)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-Laki	62,27	18,16	11,25	8,33	100,00
Perempuan	66,85	15,96	9,70	7,48	100,00
Laki-laki +Perempuan	64,62	17,03	10,46	7,89	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Susenas 2022

Ada berbagai alternatif program pendidikan untuk anak prasekolah baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah, yaitu Taman Kanak-Kanak (TK), tempat penitipan anak, Raudatul Atfhal (RA) , Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain (KB), dan lainnya.

Pada tabel 3.5 terlihat bahwa sebagian besar yaitu 64,62 persen anak usia 0-6 tahun mengikuti pendidikan pra sekolahnya pada sekolah Taman Kanak Kanak dengan rincian menurut jenis kelamin 62,27 persen laki-laki dan 66,85 persen anak perempuan. Sedangkan untuk jenis pendidikan pra sekolah Bustanul Athfal mencapai 17,03 persen. PAUD/PAUD terintegrasi/BKB/Taman Posyandu mencapai 10,46 persen dan 7,89 persen mengikuti pendidikan pra sekolah lainnya.

KETENAGAKERJAAN 2022



JUMLAH PENDUDUK BEKERJA

“ **617.320**
ORANG ”

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

“ **4,16**
PERSEN ”



PENGANGGURAN BERIJAZAH D-1 KE ATAS

“ **10,05**
PERSEN ”



DISTRIBUSI TENAGA KERJA

24,32%



PERTANIAN

26,98%



MANUFAKTUR

48,70%



JASA-JASA



SUMBER : SAKERNAS 2022

Follow us :

4. KETENAGAKERJAAN



Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2013, definisi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan produktivitas tinggi merupakan salah satu modal utama dalam proses pembangunan perekonomian yang berkesinambungan.

Pemerintah senantiasa memberi perhatian khusus terhadap permasalahan di bidang ketenagakerjaan, hal ini karena permasalahan di bidang ketenagakerjaan akan memberikan efek domino terhadap sektor perekonomian lainnya apabila dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera ditangani. Tantangan dan permasalahan ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif dan harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran terbuka, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja merupakan beberapa pekerjaan rumah yang harus segera dicari solusinya oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan wilayah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan

informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan serta dampak dari pandemi covid-19 terhadap indikator-indikator ketenagakerjaan tersebut. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2018 - 2022 kondisi Agustus. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan serta persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja.

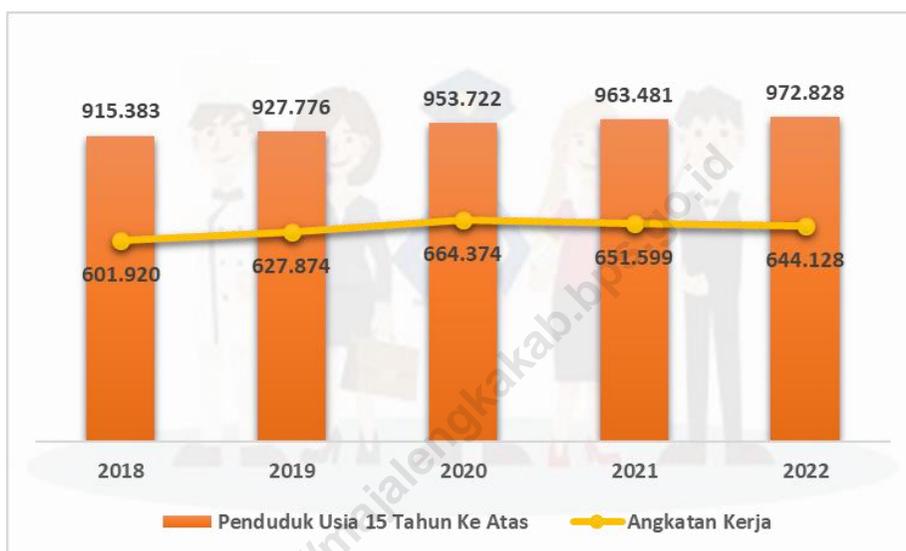
4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator utama ketenagakerjaan yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas).

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat

mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Gambar 4.1
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja
di Kabupaten Majalengka, 2018-2022

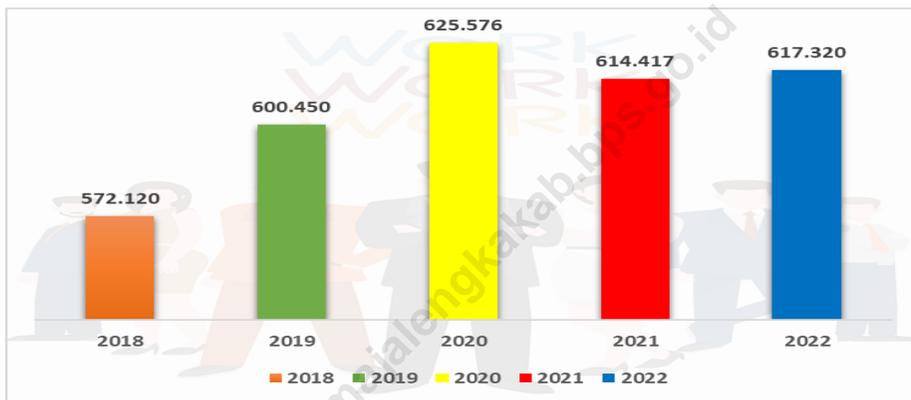


Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Sakernas 2018-2022

Dari Gambar 4.1 diatas, diketahui bahwa jumlah penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2022 sebanyak 972.828 orang, atau bertambah sekitar 9,38 ribu orang dibandingkan kondisi di tahun 2021. Adapun jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran) pada tahun 2022 mencapai 644.128 orang. Jumlah angkatan kerja mengalami penurunan sekitar 7.471 orang dibandingkan kondisi tahun sebelumnya. Apabila diperhatikan secara seksama, bisa dilihat tren jumlah penduduk usia kerja selama periode 2017 hingga 2022 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Begitu pula halnya dengan jumlah angkatan kerja, jumlah angkatan kerja terus cenderung mengalami penambahan dari

tahun ke tahun. Bertambahnya jumlah angkatan kerja harus diantisipasi sejak dini oleh pemerintah daerah, agar tidak menimbulkan permasalahan sosial yang lebih pelik. Kebijakan dan intervensi program terkait pemerataan dan perluasan kesempatan kerja harus segera dipersiapkan dan disusun pemerintah daerah.

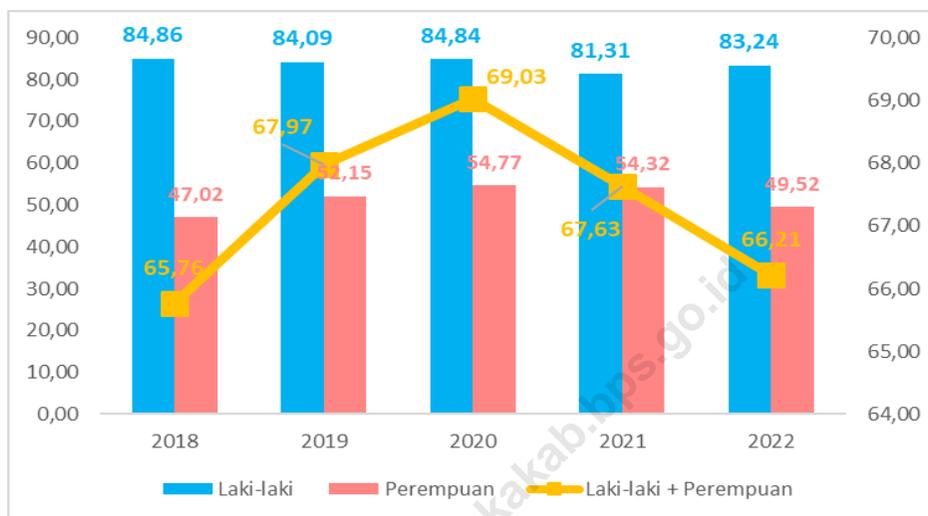
Gambar 4.2
Jumlah Penduduk Bekerja di Kabupaten Majalengka, 2018 – 2022



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Sakernas 2018–2022

Dari total angkatan kerja sebanyak 644.128 orang di tahun 2022, sebanyak 95,79 persennya melakukan aktivitas bekerja. Capaian ini menempatkan Majalengka pada posisi ke-3 di Jawa Barat dibawah Kabupaten Pangandaran (98,68 persen) dan Kabupaten Ciamis (95,99 persen). Bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk bekerja pada tahun 2022 mencapai 617.320 orang. Kondisi jumlah penduduk bekerja selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2018-2022) secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Gambar 4.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten
Majalengka, 2018 - 2022



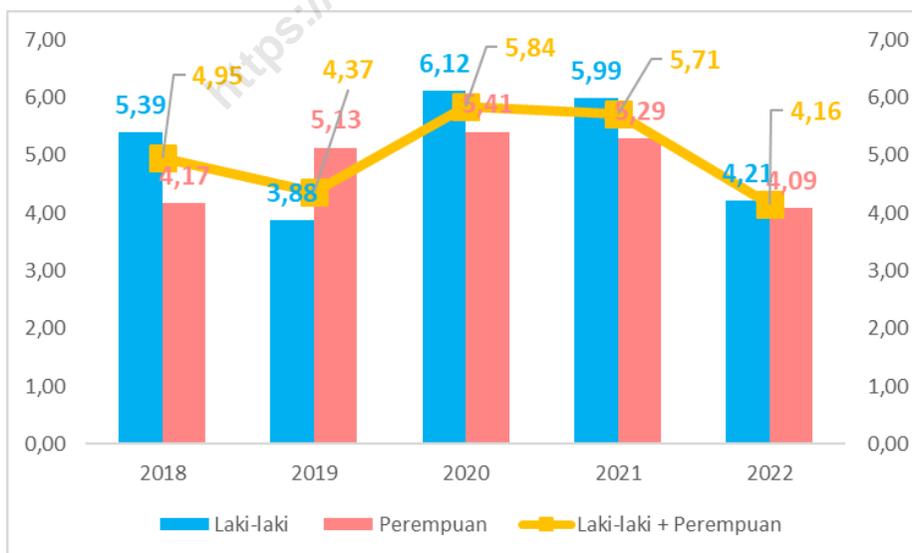
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Keadaan Angkatan Kerja Tahun 2018–2022

Tingkat partisipasi kerja di Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 sebesar 66,21 persen atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2021), dimana tercatat TPAK berada pada angka 67,63 persen. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK untuk laki-laki lebih besar daripada perempuan yaitu sebesar 83,24 persen dan 49,52 persen untuk perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Ada beberapa faktor penyebab rendahnya TPAK perempuan, satu diantaranya adalah karena adanya perbedaan upah antara pekerja laki-laki dengan pekerja perempuan. Perlu kajian akademis lebih mendalam untuk menentukan faktor penyebab rendah TPAK perempuan di kabupaten Majalengka. Faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi peningkatan atau penurunan TPAK diantaranya adalah besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), investasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran yang tinggi di suatu wilayah dapat menyebabkan tumbuhnya penyakit sosial di masyarakat, lazimnya tingkat kriminalitas akan meningkat seiring dengan tingginya tingkat pengangguran. Efek lebih jauh, akan mengganggu stabilitas pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Gambar 4.4, dapat dilihat bahwa trend tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Majalengka terus mengalami penurunan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Hal ini tentunya merupakan berita baik dan sebuah prestasi yang bagus dari pemerintah daerah yang perlu mendapat apresiasi. Akan tetapi adanya pandemi covid-19 di tahun 2020 yang memberi imbas negatif bagi perekonomian global, mengakibatkan angka TPT Majalengka mengalami sedikit lonjakan kenaikan.

Gambar 4.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Majalengka, 2018-2022

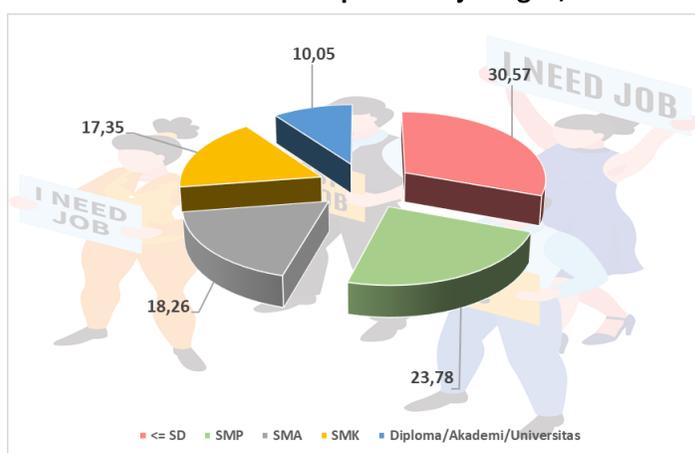


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Keadaan Angkatan Kerja Tahun 2018–2022

Di tahun 2018 angka TPT mencapai 4,95 persen, kemudian turun menjadi 4,37 persen di 2019. Di tahun 2020 sedikit mengalami lonjakan menjadi 5,84 persen dikarenakan adanya dampak/imbis dari pandemi global covid-19, kemudian turun menjadi 5,71 persen di tahun 2021. Jumlah penduduk tidak bekerja/pengangguran pada tahun 2022 sebanyak 26.808 orang atau sebesar 4,16 persen dari total angkatan kerja. Hal ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa perekonomian regional mulai *recovery* setelah terdampak pandemi Covid-19. Kabupaten Majalengka masuk 3 besar kabupaten dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terendah di Provinsi Jawa Barat, dibawah Kabupaten Pangandaran (1,56 persen) dan Kabupaten Ciamis (3,75 persen).

Dilihat menurut jenis kelamin, umumnya TPT laki-laki lebih tinggi daripada TPT perempuan. Anomali hanya di tahun 2019, ketika TPT laki-laki lebih rendah daripada TPT perempuan. Pada tahun 2022 TPT laki-laki sebesar 4,21 persen, sedangkan TPT perempuan besarnya mencapai 4,09 persen.

Gambar 4.5
Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan Di Kabupaten Majalengka, 2022



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Sakernas Agustus 2022

Jika ditelaah lebih dalam berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan, pada Gambar 4.5 terlihat bahwa persentase pengangguran tertinggi ditempati oleh penduduk yang berijazah paling tinggi SD/ sederajat, persentasenya mencapai 30,57 persen. Diikuti kemudian oleh kelompok penduduk yang menamatkan pendidikan terakhirnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang persentasenya mencapai 23,78 persen. Sementara itu, masih ada 10,05 persen lulusan pendidikan tinggi (diploma/akademi/universitas) yang masih belum memiliki pekerjaan.

Semakin rendah tingkat pendidikan akan memperkecil peluang seseorang untuk diserap oleh pasar tenaga kerja. Adapun ketika penduduk berpendidikan rendah memperoleh pekerjaan, biasanya hanya pada tingkat pekerja kasar. Lebih lengkap dapat dilihat pada Gambar 4.5.

4.3 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi 3 (tiga) kelompok utama, yaitu : 1) Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan; 2) Industri Pengolahan/Manufaktur; dan 3) Jasa-jasa.

Berdasarkan hasil pendataan, apabila dilihat menurut lapangan pekerjaan utamanya, selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir lapangan usaha sektor jasa di Kabupaten Majalengka selalu memberikan kontribusi terbesar dibandingkan sektor lapangan usaha lainnya. Sektor jasa mampu mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja di bandingkan dengan sektor pertanian dan sektor industri manufaktur. Rata-rata setiap tahun sektor lapangan usaha jasa mampu menyerap 40-60 persen tenaga kerja dari pasar tenaga kerja. Lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 4.1
Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang lalu Menurut
Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Majalengka, 2018 - 2022

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	129.630	151.811	174.418	134.529	150.129
Industri Pengolahan/Manufaktur	137.111	136.878	130.817	193.268	166.571
Jasa-jasa	305.379	311.761	320.341	286.620	300.620
Total	572.120	600.450	625.576	614.417	617.320

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Sakernas 2018–2022

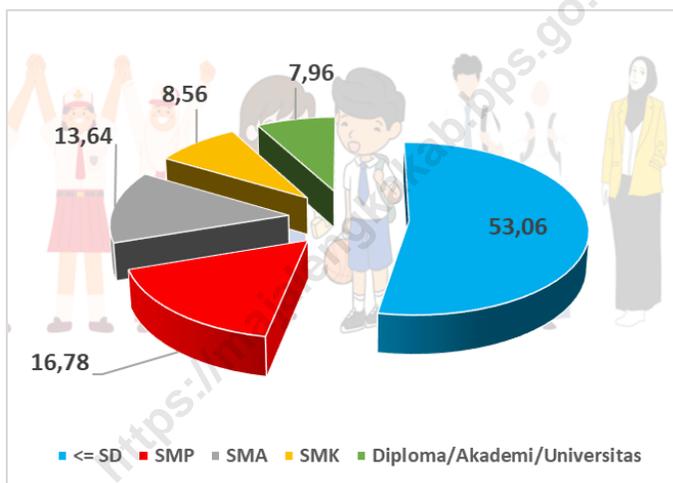
Dari tabel dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 ada sebanyak 150.129 orang atau 24,32 persen tenaga kerja terserap pada lapangan usaha pertanian. Sementara itu industri pengolahan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 166.571 orang atau 26,98 persen dari total penduduk bekerja. Sektor jasa menjadi sektor terbesar yang mampu menyerap tenaga kerja di kabupaten Majalengka, dengan serapan sebanyak 48,70 persen atau 300.620 pekerja.

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan mampu melampaui penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Seiring dengan dibangunnya Bandara Internasional Jawa Barat beserta akses pendukungnya serta banyaknya relokasi industri manufaktur ke wilayah Kabupaten Majalengka menjadikan Kabupaten Majalengka sebagai salah satu kawasan yang menarik bagi investor dan tumbuh suburnya industri manufaktur. Permintaan tenaga kerja di sektor industri manufaktur melonjak secara cukup signifikan. Hal ini mendorong terjadinya perubahan struktur perekonomian di Kabupaten Majalengka. dari

perekonomian wilayah yang berbasis agraris menjadi perekonomian wilayah yang ditopang oleh output dari sektor industri.

Dari Gambar 4.6, dapat diketahui bahwa sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Majalengka adalah lulusan Sekolah Dasar (SD). Data mencatat ada 53,06 persen tenaga kerja di Kabupaten Majalengka yang berijazah paling tinggi SD/ sederajat.

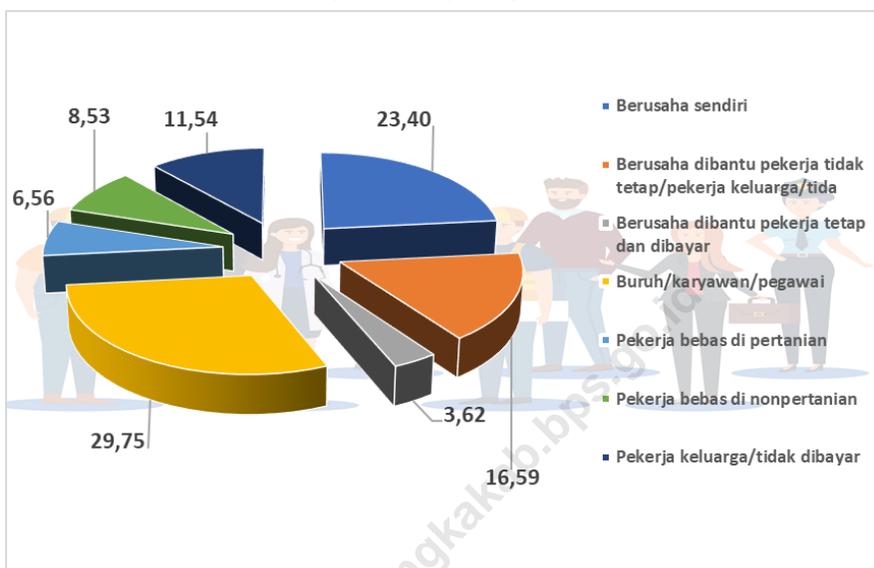
Gambar 4.6
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan di Kabupaten Majalengka, 2022



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Sakernas 2022

Jika dilihat dari status pekerjaan (Gambar 4.7), kondisi tahun 2022 jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai masih lebih besar dibandingkan status pekerjaan yang lain. Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai pada tahun 2022 sebanyak 183.666 jiwa atau sekitar 29,75 persen. Jumlah penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri sekitar 23,40 persen atau sebanyak 144.477 orang.

Gambar 4.7
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
di Kabupaten Majalengka, 2022



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Sakernas 2022

Jumlah penduduk dengan status berusaha dibantu buruh baik tetap maupun tidak tetap, juga memiliki persentase yang cukup tinggi yaitu 20,21 persen atau 124.778 orang. Sedangkan pekerja bebas di pertanian sebanyak 40.473 orang atau 6,56 persen, pekerja bebas di bukan pertanian sebanyak 52.662 orang atau sebesar 8,53 persen dan selebihnya 11,54 persen adalah pekerja keluarga/atau pekerja tidak dibayar sekitar 71.264 orang.

Pekerja keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Berdasarkan Gambar 4.8, persentase pekerja keluarga/ pekerja tidak dibayar masih relatif tinggi. Umumnya pekerja keluarga/tidak dibayar ini didominasi oleh perempuan. Perempuan dengan pendidikan rendah dan berstatus menikah terpaksa memilih menjadi pekerja

keluarga/tidak dibayar karena kecil peluang mereka untuk masuk dalam pasar kerja formal.

<https://majalengkakab.bps.go.id>

TARAF DAN POLA KONSUMSI 2022



RATA-RATA PENGELUARAN
PER KAPITA PER BULAN
PENDUDUK MAJALENGKA

RP. 1.029.656

PENGELUARAN RUMAH TANGGA

POLA
KONSUMSI

MAKANAN

NON
MAKANAN

POLA KONSUMSI KELOMPOK PENDUDUK DENGAN PENGELUARAN TERENDAH

MAKANAN



64,70
PERSEN

NON
MAKANAN



35,30
PERSEN

POLA KONSUMSI KELOMPOK PENDUDUK DENGAN PENGELUARAN TERTINGGI

MAKANAN



41,99
PERSEN

NON
MAKANAN



58,01
PERSEN

RATA-RATA KONSUMSI MAKANAN
PER KAPITA PER BULAN



Rp. 555.269

RATA-RATA KONSUMSI NON MAKANAN
PER KAPITA PER BULAN



Rp. 474.386

SUMBER : SUSENAS 2022

Follow us :

5. TARAF DAN POLA KONSUMSI



Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat lebih mudah tergambarkan realitasnya dengan pengukuran melalui pendekatan pendapatan rumah tangga. Tetapi kenyataannya di lapangan, cukup sulit memperoleh data terkait dengan pendapatan rumah tangga. Narasumber biasanya kurang terbuka ketika memberikan informasi terkait pendapatan. Oleh karena keterbatasan tersebut, maka digunakan pendekatan pengeluaran atau konsumsi (*consumption approach*) untuk mengukur tingkat pendapatan rumah tangga.

Pola konsumsi masyarakat mengindikasikan suatu kemampuan masyarakat mengkonsumsi barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup serta menjaga kelangsungan hidup. Menurut Suparmoko (1998), terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat/taraf konsumsi selain dari pendapatan, yaitu : selera, faktor sosial ekonomi, kekayaan, keuntungan atau kerugian kapital, tingkat bunga dan tingkat harga. Lazimnya, taraf dan pola konsumsi memiliki hubungan linier dengan pendapatan, semakin besar pendapatan, maka semakin besar juga pengeluaran konsumsi.

Selama ini berkembang asumsi bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut memiliki pendapatan rendah. Makin tinggi pendapatan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera apabila

persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

5.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga jika dilihat menurut alokasi penggunaannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan non/bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi.

Kedadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Lebih lengkap terkait dengan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut golongan pengeluaran penduduk Majalengka bisa dilihat pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran
di Kabupaten Majalengka, 2022



Sumber : BPS Jawa Barat, Pola Konsumsi Penduduk Jawa Barat, 2022

Pendataan Susenas memberikan informasi kesejahteraan masyarakat yang salah satunya direpresentasikan melalui pengeluaran konsumsi rumah tangga. Berdasarkan data Susenas, gambaran pengeluaran rata-rata per kapita di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada Gambar 5.1. Pada gambar terlihat rata-rata pengeluaran per kapita sebulan berdasarkan golongan/kelompok pengeluaran. Pada kelompok pengeluaran terendah, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan mencapai Rp. 254.253,-. Sedangkan pada kelompok pengeluaran tertinggi (lebih dari Rp. 1.500.000), rata-rata pengeluaran per kapita sebulan mencapai Rp. 2.661.973,-. Jika dikomparasikan dengan beberapa kabupaten tetangga, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan kelompok pengeluaran tertinggi di Kabupaten Majalengka lebih tinggi dari rata-rata pengeluaran per kapita sebulan kelompok pengeluaran tertinggi di Kabupaten Cirebon (Rp. 2.415.222) dan Kabupaten Indramayu (Rp. 2.270.112).

Jika dilihat komposisi/pola pengeluaran makanan dan non makanan menurut golongan pengeluaran, maka pada tahun 2022 pola yang bisa dilihat secara umum adalah pengeluaran untuk makanan lebih besar daripada pengeluaran non makanan, kecuali untuk golongan pengeluaran tertinggi. Pada golongan/kelompok pengeluaran bawah, persentase pengeluaran untuk makanan ada dikisaran 50-70 persen, sedangkan persentase pengeluaran untuk kebutuhan non makanan berkisar antara 30-50 persen. Berbanding terbalik dengan pola konsumsi pada golongan/kelompok pengeluaran tertinggi, persentase pengeluaran makanan hanya sebesar 41,99 persen, lebih kecil dari persentase pengeluaran non makanan yang besarnya mencapai 58,01 persen.

Pergeseran atau peningkatan pengeluaran rumah tangga dari kelompok pengeluaran rendah ke kelompok pengeluaran lebih tinggi bisa diinterpretasikan dalam dua perspektif berbeda. Pertama, bisa jadi kondisi tersebut memperlihatkan adanya peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Sedangkan perspektif yang kedua, adanya kenaikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan harga berbagai kebutuhan rumah tangga. Lebih lengkap terkait dengan taraf dan pola konsumsi penduduk Majalengka bisa dilihat pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2.

Tabel 5.1
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang dan
Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Majalengka, 2022

Kelompok Barang	KELOMPOK PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN (Rp)							Rata-rata Pengeluaran per Kapita
	Kurang dari 200.000	200.000 - 299.999	300.000 - 499.999	500.000 - 749.999	750.000 - 999.999	1.000.000 - 1.499.999	Lebih dari 1.500.000	
A. Makanan								
1. Padi-padian	-	45.596	49.954	55.458	56.668	64.587	85.882	60.655
2. Umbi-umbian	-	975	2.474	2.993	4.325	7.818	7.615	4.630
3. Ikan	-	3.214	8.041	13.002	18.769	27.068	43.587	19.985
4. Daging	-	2.950	15.250	21.455	23.999	34.189	63.768	29.062
5. Telur dan Susu	-	10.418	12.911	19.155	21.596	34.041	65.823	27.855
6. Sayur-sayuran	-	12.918	18.605	26.756	34.920	45.456	60.310	34.771
7. Kacang-kacangan	-	6.866	6.384	10.861	13.062	15.302	22.274	12.847
8. Buah-buahan	-	4.383	9.248	14.690	23.244	40.378	67.045	27.314
9. Minyak dan Lemak	-	4.509	6.778	9.461	14.285	19.056	24.293	13.631
10. Bahan minuman	-	13.101	12.101	15.884	20.641	25.178	32.743	20.112
11. Bumbu-bumbuan	-	2.277	6.837	9.692	12.064	16.340	25.038	12.939
12. Konsumsi lainnya	-	3.065	6.475	8.841	13.916	15.680	24.949	12.825
13. Makanan dan minuman jadi	-	40.451	74.587	130.375	179.030	228.038	397.744	184.422
14. Tembakau dan sirih	-	13.777	36.807	70.013	91.929	117.480	196.652	94.222
Jumlah Makanan		164.500	266.451	408.637	528.447	690.612	1.117.724	555.269
B. Non Makanan								
1. Perumahan dan Fasilitas rumah tangga	-	54.663	79.843	123.511	181.046	270.348	608.643	222.503
2. Barang dan jasa	-	22.311	40.848	53.698	78.954	126.013	332.462	109.473
3. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	-	4.753	10.983	15.901	22.473	36.379	80.192	29.146
4. Barang-barang yang tahan lama	-	118	4.158	7.080	20.878	29.300	323.293	59.893
5. Pajak dan asuransi	-	7.586	13.749	17.763	23.112	35.573	93.996	32.290
6. Keperluan pesta dan upacara	-	22	644	873	5.467	23.121	105.663	21.081
Jumlah Non Makanan	-	89.753	150.224	218.826	331.930	520.735	1.544.249	474.386
Jumlah Makanan dan Non Makanan	-	254.253	416.675	627.462	860.377	1.211.346	2.661.973	1.029.656

Sumber : BPS Jawa Barat, Pola Konsumsi Penduduk Jawa Barat, 2022

Tabel 5.2
Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok
Barang dan Kelompok Pengeluaran di Kab. Majalengka, 2022

Kelompok Barang	KELOMPOK PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN (Rp)							
	Kurang dari 200.000	200.000 – 299.999	300.000 – 499.999	500.000 – 749.999	750.000 – 999.999	1.000.000 – 1.499.999	Lebih dari 1.500.000	Rata-rata Pengeluaran per Kapita
A. Makanan								
1. Padi-padian	-	17,93	11,99	8,84	6,59	5,33	3,23	5,89
2. Umbi-umbian	-	0,38	0,59	0,48	0,50	0,65	0,29	0,45
3. Ikan	-	1,26	1,93	2,07	2,18	2,23	1,64	1,94
4. Daging	-	1,16	3,66	3,42	2,79	2,82	2,40	2,82
5. Telur dan Susu	-	4,10	3,10	3,05	2,51	2,81	2,47	2,71
6. Sayur-sayuran	-	5,08	4,47	4,26	4,06	3,75	2,27	3,38
7. Kacang-kacangan	-	2,70	1,53	1,73	1,52	1,26	0,84	1,25
8. Buah-buahan	-	1,72	2,22	2,34	2,70	3,33	2,52	2,65
9. Minyak dan Lemak	-	1,77	1,63	1,51	1,66	1,57	0,91	1,32
10. Bahan minuman	-	5,15	2,90	2,53	2,40	2,08	1,23	1,95
11. Bumbu-bumbuan	-	0,90	1,64	1,54	1,40	1,35	0,94	1,26
12. Konsumsi lainnya	-	1,21	1,55	1,41	1,62	1,29	0,94	1,25
13. Makanan dan minuman jadi	-	15,91	17,90	20,78	20,81	18,83	14,94	17,91
14. Tembakau dan sirih	-	5,42	8,83	11,16	10,68	9,70	7,39	9,15
Jumlah Makanan	-	64,70	63,95	65,13	61,42	57,01	41,99	53,93
B. Non Makanan								
1. Perumahan dan Fasilitas rumah tangga	-	21,50	19,16	19,68	21,04	22,32	22,86	21,61
2. Barang dan jasa	-	8,78	9,80	8,56	9,18	10,40	12,49	10,63
3. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	-	1,87	2,64	2,53	2,61	3,00	3,01	2,83
4. Barang-barang yang tahan lama	-	0,05	1,00	1,13	2,43	2,42	12,14	5,82
5. Pajak dan asuransi	-	2,98	3,30	2,83	2,69	2,94	3,53	3,14
6. Keperluan pesta dan upacara	-	0,01	0,15	0,14	0,64	1,91	3,97	2,05
Jumlah Non Makanan	-	35,30	36,05	34,87	38,58	42,99	58,01	46,07
Jumlah Makanan dan Non Makanan	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

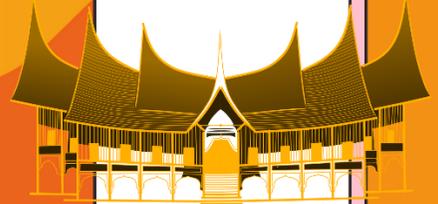
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Pola Konsumsi Penduduk Jawa Barat 2022

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN 2022

KEPEMILIKAN RUMAH

**88,22
PERSEN**

MEMILIKI RUMAH SENDIRI.
11,78 PERSEN SISANYA
TINGGAL DI RUMAH
DINAS/SEWA/KONTRAK/
BEBAS SEWA



KONSUMSI AIR BERSIH

MEMANFAATKAN
FASILITAS AIR MINUM
BERSIH

**94,60
PERSEN**

KEPEMILIKAN JAMBAN

**90,34
PERSEN**

MEMILIKI JAMBAN
SENDIRI, SISANYA
MEMANFAATKAN JAMBAN
BERSAMA ATAU JAMBAN
UMUM



PEMBUANGAN AKHIR MCK

MENGGUNAKAN
SEPTIC TANK SEBAGAI
PEMBUANGAN AKHIR

**83,98
PERSEN**

Follow us :

6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN



Papan, adalah salah satu kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan manusia selain sandang dan pangan. Papan dalam hal ini adalah kebutuhan akan rumah tempat tinggal yang layak baik dari segi fisik, fasilitas maupun lingkungannya. Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Fungsi rumah adalah sebagai tempat tinggal, selain itu juga kepemilikan rumah dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan fasilitas yang ada di rumah tersebut. Status sosial seseorang yang makin tinggi, semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan fasilitas yang lebih baik dan lengkap.

6.1 Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Berbicara tentang tingkat kesejahteraan rakyat dan peningkatan taraf hidup masyarakat dilihat dari sisi perumahan, tentunya yang pertama dan utama yang harus dibahas adalah status kepemilikan rumah itu sendiri.

Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Untuk mendorong dan mempermudah pemenuhan kebutuhan kepemilikan rumah layak huni bagi masyarakat utamanya masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah konsisten memberikan berbagai stimulus di sektor perumahan. Stimulus fiskal tersebut berupa Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk masyarakat yang membeli rumah dengan skema kredit melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Tabel 6.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Majalengka, 2018–2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Milik sendiri	%	78,17	85,43	85,00	87,95	88,22
Rumah Dinas/lainnya	%	21,83	14,57	15,00	12,05	11,78

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Susenas 2018–2022

Menurut hasil Susenas Maret 2022, pada Tabel 6.1 menunjukkan bahwa rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 88,22 persen. Sisanya 11,78 persen rumah tangga menetap di rumah yang bukan milik sendiri. Jika dilihat secara sepintas, persentase status kepemilikan rumah sendiri pada periode tahun 2018-2022, maka dapat terlihat bahwa persentase penduduk yang menghuni rumah tinggal milik sendiri mengalami

kenaikan di kisaran 10 persen. Menjamurnya pembangunan kompleks perumahan di Kabupaten Majalengka dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tingginya animo masyarakat untuk memiliki rumah sendiri dan bisa mengindikasikan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

6.2 Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal merupakan pemenuhan atas kebutuhan aktivitas seluruh anggota rumah tangga. Kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal akan menentukan kualitas kenyamanan rumah tinggal dan berdampak positif terhadap kesejahteraan. Karakteristik rumah yang layak huni adalah rumah yang memiliki fasilitas yang lengkap dan baik. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi fasilitas rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih yang tersedia dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Tabel 6.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan
di Kabupaten Majalengka, 2018–2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Air minum bersih *)	%	76,15	77,16	87,36	95,44	94,60
Jamban sendiri	%	78,17	86,08	84,27	88,42	90,34
Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tangki Septik/IPAL/SPAL	%	82,14	84,13	85,99	87,26	83,98

*) Terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja lebih dari 10 m

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Susenas 2018–2022

Berdasarkan Tabel 6.2, persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih pada tahun 2022 telah mencapai 94,60 persen. Air minum bersih terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja lebih dari 10 m.

Selain fasilitas ketersediaan air minum, penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Pembuangan kotoran manusia yang tidak sesuai dengan standar kesehatan akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Dampak lebih lanjutnya menyebabkan berbagai macam penyakit seperti *thypus*, disentri, kolera, dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Salah satu fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Selama tahun 2022 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri sebesar 90,34 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan jamban sendiri sudah menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh rumah tangga. Selanjutnya selain telah memiliki jamban sendiri, penggunaan jamban dengan tangki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Pada tahun 2022 rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik sudah mencapai 83,96 persen.

KEMISKINAN 2022

1

GARIS KEMISKINAN
Rp. 483.319,-

2

JUMLAH
PENDUDUK MISKIN
147,1
RIBU ORANG

3

PERSENTASE
PENDUDUK MISKIN
11,94
PERSEN

4

INDEKS
KEDALAMAN
KEMISKINAN
1,55
POIN

INDEKS
KEPARAHAN
KEMISKINAN
0,36
POIN

5

KARAKTERISTIK PENDUDUK MISKIN

72,20 %
BERIJAZAH PALING
TINGGI SD/SEDERAJAT

48,65 %
TIDAK MEMILIKI
PEKERJAAN/
PENGANGGURAN

SUMBER : SUSENAS 2022

Follow us :

7. KEMISKINAN



Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan harus menjadi sebuah tujuan utama dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, karena aspek dasar yang dapat dijadikan acuan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah teratasinya masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang

membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin".

Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Berbagai program pemberantasan kemiskinan dirancang dan diterapkan di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang. Terbentuknya *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai kelanjutan dari *Millenium Development Goals (MDGs)* merupakan agenda pembangunan pasca MDGs yang berakhir tahun 2015. Target yang pertama dari SDGs adalah mengakhiri kemiskinan, dengan beberapa indikator pendukung antara lain menurunkan jumlah orang yang hidup kurang dari \$1,25 per hari. Indikator lain yang terkait dalam mengakhiri kemiskinan antara lain melindungi orang yang miskin dan rentan dengan sistem perlindungan sosial.

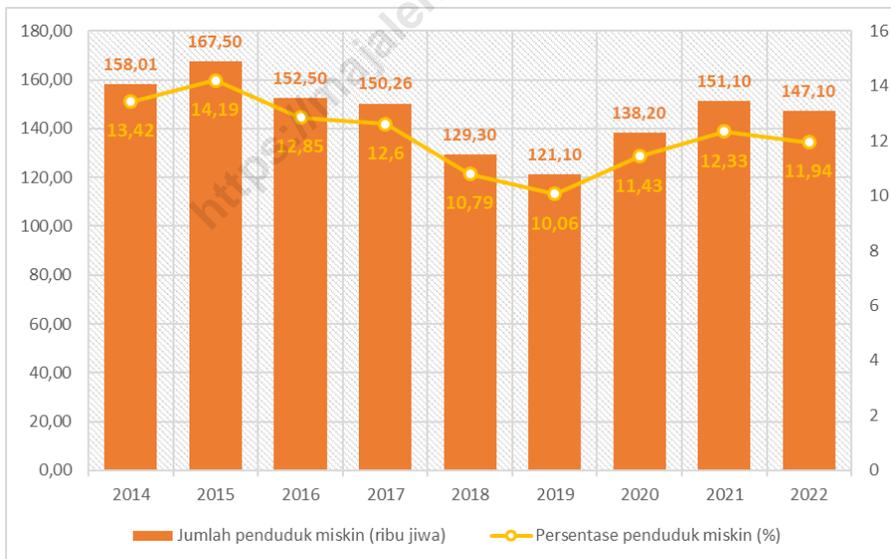
Di tengah upaya keras pemerintah melakukan berbagai program kebijakan dalam pemberantasan korupsi, muncul tantangan yang besar. Merebaknya pandemi covid-19 di seluruh dunia, berakibat buruk terhadap perekonomian global. Hampir semua negara di dunia mengalami resesi perekonomian karena virus corona ini. Kontraksi perekonomian ini secara

alamiah akan berpengaruh terhadap kemiskinan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Hal yang sama berlaku pula di Kabupaten Majalengka.

7.1 Perkembangan Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Gambar 7.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Majalengka, 2014-2022



Sumber : Statistik Daerah Provinsi Jawa Barat, 2014 - 2022

Penduduk miskin di Kabupaten Majalengka secara total menunjukkan tren menurun selama periode 2014-2022 (keadaan bulan Maret). Tahun 2015,

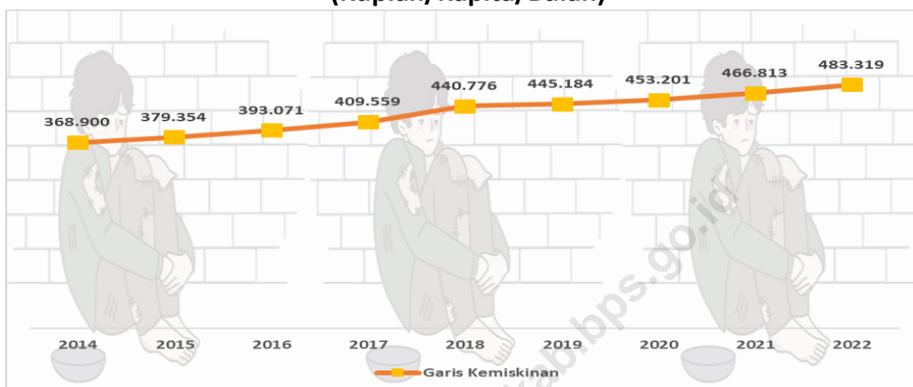
jumlah penduduk miskin sebesar 167,50 ribu jiwa atau 14,19 persen dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Majalengka. Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan, dan pada Maret tahun 2019 jumlah penduduk miskin sudah berkurang menjadi 121,06 ribu jiwa atau 10,06 persen dari total jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka. Angka ini masih sedikit di atas persentase kemiskinan nasional tahun 2019, yaitu 9,41 persen. Tren penurunan kemiskinan terhenti sementara di tahun 2019. Di tahun 2020, akibat dari pandemi covid-19 terhadap berbagai sektor perekonomian, tingkat kemiskinan di Majalengka mengalami kenaikan menjadi 11,43 persen. Kemiskinan kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 12,33 persen. Dan di tahun 2022, kemiskinan berhasil ditekan hingga mencapai angka 11,94 persen. Pemerintah daerah perlu mengeluarkan tenaga ekstra untuk merumuskan intervensi kebijakan yang tepat tujuan dan tepat sasaran sehingga secara efektif mampu menekan persentase penduduk miskin secara signifikan di tengah resesi global akibat dari pandemi covid-19 yang mematikan.

7.2 Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll. Garis kemiskinan non makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang,

pendidikan dan kesehatan. Paket Komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Gambar 7.2
Garis Kemiskinan di Kabupaten Majalengka, 2014–2022
(Rupiah/Kapita/Bulan)



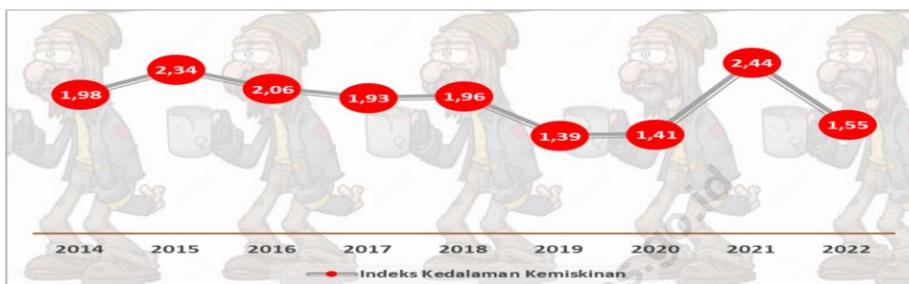
Sumber : Statistik Daerah Provinsi Jawa Barat, 2014 - 2022

Garis kemiskinan Kabupaten Majalengka terus mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2014–2022, tahun 2014 sebesar Rp 368.900 dan di tahun 2022 sebesar Rp 483.319 dengan persentase kenaikan mencapai 26,54 persen. Sementara itu, peningkatan garis kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2018, terjadi kenaikan sebesar Rp. 31.217 dibandingkan tahun sebelumnya.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode 2014–2022 (Gambar 7.3), P1 mengalami fluktuasi, dimana nilai tahun 2014 sebesar 1,98, kemudian tahun 2015 meningkat menjadi 2,34. Sempat mengalami tren penurunan dari tahun 2015-2019, tetapi di tahun 2020 dan 2021 kembali meningkat. Di tahun 2022 indeks kedalaman kemiskinan kembali turun menjadi menjadi 1,55. Nilai P1 yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat, demikian sebaliknya. Diharapkan dengan nilai P1

yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

Gambar 7.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Majalengka, 2014-2022



Sumber : Statistik Daerah Jawa Barat, 2014 - 2022

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Sama halnya dengan P1, P2 juga mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2015 (lihat Gambar 7.4) meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya, namun pada tahun berikutnya kembali mengalami penurunan. P2 pada tahun 2017 mencapai 0,45, kemudian tahun 2018 meningkat lagi menjadi 0,51 dan di tahun 2022 turun lagi menjadi 0,36. Kenaikan nilai indeks menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin besar. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar 7.4
Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Majalengka, 2014–2022

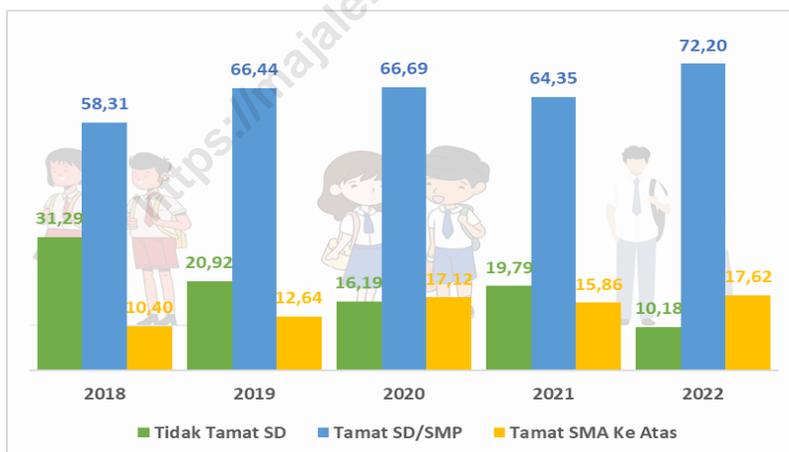


Sumber : Statistik Daerah Jawa Barat, 2014 – 2022

7.3 Karakteristik Pendidikan Penduduk Miskin

Perbaikan tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang baik cenderung mengupayakan anggota rumah tangga yang dipimpinnya juga memiliki tingkat pendidikan yang baik. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga cenderung akan memiliki tingkat pendapatan yang semakin tinggi, dan semakin kecil kemungkinan rumah tangga tersebut berada dalam kondisi miskin. Hal yang perlu diperhatikan dalam menangani pengentasan kemiskinan selain pendidikan kepala rumah tangga yaitu pendidikan anak dari rumah tangga miskin.

Gambar 7.5
Penduduk Miskin Menurut Pendidikan yang ditamatkan
di Kabupaten Majalengka (persen), 2018-2022



Sumber : BPS RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Majalengka menurut pendidikan yang ditamatkan tahun 2022 (Gambar 7.5) menunjukkan sebagian besar penduduk miskin adalah tamat SLTP ke bawah. Sebanyak 72,20 persen penduduk miskin tamat SD/SLTP dan sederajat. Kemudian 10,18 persen

penduduk miskin adalah tidak tamat SD. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesempatan rumah tangga untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi menyebabkan rumah tangga tersebut rentan dengan kondisi miskin.

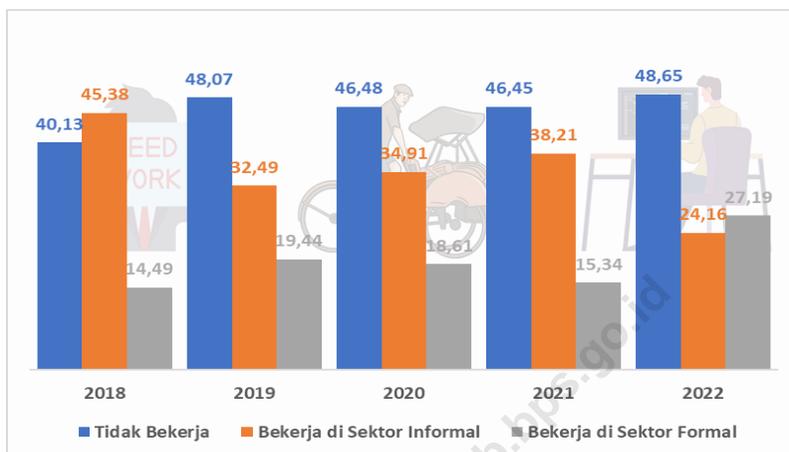
Jika dibandingkan dengan tahun 2020, maka terlihat adanya peningkatan kelompok penduduk miskin yang mengenyam pendidikan SMA ke atas. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin yang tamat SMA ke atas sebesar 10,40 persen, namun pada tahun 2022 meningkat hingga mencapai 17,62 persen. Hal ini bisa menjadi salah satu indikasi dari efek negatif pandemi covid-19, dimana banyaknya tenaga kerja terpelajar yang terpaksa kehilangan pekerjaannya karena perusahaan yang mempekerjakan mereka melakukan efisiensi anggaran karena pandemi covid-19. Pemutusan kerja (PHK) massal ini yang mengakibatkan mereka akhirnya terperosok ke jurang kemiskinan.

7.4 Karakteristik Ketenagakerjaan Penduduk Miskin

Indikator lainnya setelah pendidikan yang dapat digunakan untuk melihat karakteristik rumah tangga miskin yaitu ketenagakerjaan. Persentase penduduk miskin yang tidak bekerja mencapai 48,65 persen pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, maka mengalami kenaikan 2,20 persen.

Lazimnya, penduduk yang bekerja di sektor informal mendapatkan pendapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan penduduk yang bekerja di sektor formal. Sehingga kecenderungan persentase penduduk miskin akan lebih banyak pada kelompok pendudukan yang bekerja di sektor informal.

Gambar 7.6
Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Kabupaten Majalengka (dalam persen), 2018–2022

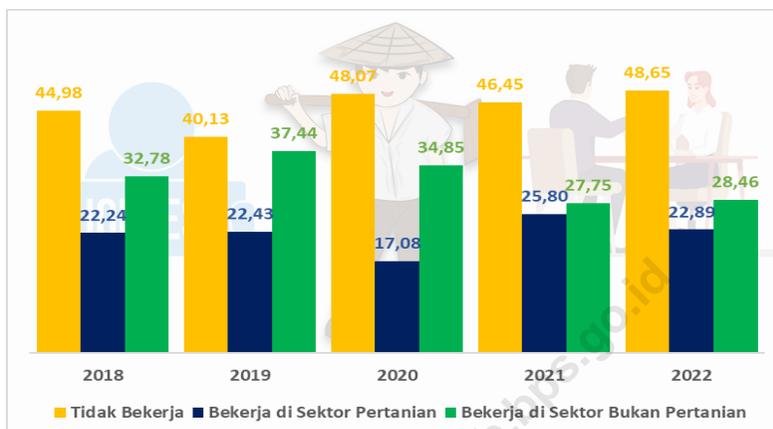


Sumber : BPS RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018–2022

Meningkatnya persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja tentunya berpengaruh pada penurunan penduduk yang bekerja. Dari 151,1 ribu penduduk miskin pada tahun 2022, sebanyak 24,16 persen bekerja pada sektor informal dan 27,19 persen bekerja pada sektor formal. Perubahan signifikan struktur pada status bekerja ini diindikasikan karena dampak besar dari resesi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid 19 di tahun 2020-2021.

Pasca terjadi pandemi covid-19, persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan. Pada tahun 2020 mencapai 17,08 persen, naik menjadi 25,80 persen di tahun 2021 dan di tahun 2022 turn kembali menjadi 22,89 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor bukan pertanian mengalami peningkatan, pada tahun 2022 mencapai 28,46 dari semula sebesar 27,75 persen di tahun 2021. Lebih lengkap dapat di lihat pada Gambar 7.7 berikut.

Gambar 7.7
Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja dan Bidang Pekerjaan di Kabupaten Majalengka (dalam persen), 2018–2022



Sumber : BPS RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018–2022

7.5 Fasilitas Bantuan yang Diterima Rumah Tangga Miskin

Pemerintah dalam melaksanakan program-programnya untuk rakyat miskin, banyak memberikan fasilitas-fasilitas demi meringankan beban rumah tangga miskin, di antaranya pemberian subsidi pada beras murah Raskin (Beras Miskin) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dapat digunakan untuk berobat.

Tabel 7.1
Persentase Rumah Tangga Miskin yang Pernah Menerima Raskin, Rata-rata Raskin dan Rata-rata Harga di Kabupaten Majalengka, 2018–2022

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Ruta Miskin penerima Raskin/BPNT	%	78,11	34,09	45,43	47,50	57,85
Jumlah Beras Diterima Per bulan	Kg	6,46	n.a	8,32	9,74	21,14
Rata-rata Harga yang dibayar Per kg	Rp	1.520	n.a	10.780	10.131	10.748

Sumber : BPS RI, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018–2022

Persentase rumah tangga miskin yang menerima raskin pada tahun 2018 mencapai 78,11 persen. Di tahun 2020-2021, dalam upaya menanggulangi dampak pandemi covid-19, pemerintah menyalurkan anggaran yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini memicu kenaikan persentase raskin di Majalengka yang menerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tercatat ada 57,85 persen rumah tangga miskin di Majalengka menerima program BPNT pada tahun 2022. Rata-rata beras raskin yang diterima pun mengalami peningkatan, dari 6,46 kilogram pada tahun 2018 menjadi 9,74 kilogram pada tahun 2021 dan tahun 2022 naik menjadi 21,14 kilogram. Adapun harga beras raskin per kilogram yang dibayar rumah tangga miskin di tahun 2022 sebesar Rp. 10.748/kg.

SOSIAL LAINNYA 2022

RUMAH TANGGA
MENGUNAKAN HANDPHONE
ATAU KOMPUTER/LAPTOP

80,33
PERSEN



RUMAH TANGGA MEMILIKI
AKSES TERHADAP INTERNET

62,29
PERSEN

RUMAH TANGGA PENERIMA PROGRAM
BANTUAN PANGAN NON TUNAI

37,06
PERSEN



RUMAH TANGGA PENERIMA
KARTU KELUARGA SEJAHTERA

29,30
PERSEN

RUMAH TANGGA PENERIMA
PROGRAM KELUARGA HARAPAN

16,01
PERSEN



SUMBER : SUSENAS 2022

Follow us :

8. SOSIAL LAINNYA



Pada Bab ini akan diuraikan beberapa data sosial lainnya yang merupakan pendekatan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Majalengka. Cakupan pembahasan meliputi data akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi serta penerima Program Perlindungan Sosial.

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis, serta tingkat keamanan wilayahnya. Pelayanan kesehatan gratis tersebut memungkinkan masyarakat dapat mengalihkan pendapatannya pada keperluan hidup lainnya guna meningkatkan kesejahteraaannya. Selain itu pula rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas.

8.1. Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

Peningkatan penggunaan telepon seluler (*handphone*) cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon kabel/rumah. Telepon rumah semakin jarang digunakan dan cenderung ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan dan penggunaan telepon seluler. Secara umum anggota rumah tangga yang berusia 5 tahun keatas yang memiliki telepon selular sebanyak 80,33 persen tahun 2022 (lihat Tabel 8.1).

Pada saat ini masyarakat cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana dan lebih bersifat pribadi. Selain itu pula tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain.

Tabel 8.1
Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke atas menurut Jenis Kelamin dan Karakteristik Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir di Kabupaten Majalengka, 2022

Indikator	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Menggunakan Telpn Selular (HP)/NirkaBel atau Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet)	80,98	72,12	80,33
Akses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp, dll)	62,83	55,37	62,29

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Susenas 2022

Anggota rumah tangga yang berusia 5 tahun ke atas yang menggunakan Telepon Seluler dan Komputer untuk laki-laki lebih tinggi persentasenya dibandingkan perempuan, masing-masing sebesar 80,98 persen dan 72,12 persen. Sedangkan yang bisa mengakses internet hanya sebesar 62,29 persen saja dengan tingkat akses laki-laki terhadap internet sebesar 62,83 persen, lebih tinggi dibanding perempuan yang hanya sebesar 55,37 persen

8.2 Program Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial dapat membantu menangani kemiskinan, dengan mengurangi ketidaksetaraan dan membangun ketahanan rumah tangga dalam menghadapi hal tak terduga seperti penyakit maupun

kecelakaan, yang dapat mendorong masyarakat miskin lebih jauh ke dalam kemiskinan.

Program perlindungan sosial yang efektif dapat berkontribusi pada 14 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB atau SDGs). Pemerintah Indonesia berkomitmen menciptakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif lewat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai pada 2014.

Tabel 8.2
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima di Kabupaten Majalengka , 2022

Jenis Program Perlindungan Sosial	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program
(1)	(2)
Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako)	37,06
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	29,30
Program Keluarga Harapan (PKH)	16,01

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Susenas 2022

Pada tahun 2022, persentase rumah tangga penerima intervensi program Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT atau Program bantuan sembako mencapai 37,06 persen dari total jumlah rumah tangga di Kabupaten Majalengka. BPNT diharapkan mampu membantu masyarakat kurang mampu dalam pemenuhan asupan zat gizi dan kalori yang layak. Komposisi komponen bantuan bisa berupa sumber karbohidrat, sumber protein, sumber vitamin dan sumber mineral. Biasanya jenisnya beragam disesuaikan dengan potensi bahan makanan pokok yang tersedia di masing-masing wilayah.

Selain BPNT, ada juga program perlindungan sosial berupa intervensi Program Indonesia Pintar (PIP). PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal SD sampai SMA/SMK maupun jalur non formal paket A sampai paket C dan pendidikan khusus. Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Program perlindungan sosial lainnya yang banyak juga manfaatnya bagi keluarga tidak mampu/keluarga miskin adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), dimana seluruh keluarga dalam 1 rumah tangga berhak menerima bantuan (maksimal 4 orang). Penerima PKH adalah keluarga miskin yang pada saat registrasi memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan PKH, yaitu:

1. Ibu hamil/nifas/anak balita.
2. Anak sekolah SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun).
3. Anak sekolah SLTP/MTs/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun).
4. Anak SMA atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.
5. Disabilitas Berat.

6. Lansia usia maksimal 70 tahun.

Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Pada tahun 2022 jumlah rumah tangga penerima intervensi program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Majalengka mencapai 16,01 persen.

<https://majalengkakab.bps.go.id>

<https://majalengkakab.bps.go.id>



LAMPIRAN

<https://majalengkakab.bps.go.id>

Lampiran 1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	LPP	LPP Jawa Barat
	Laki-laki	Perempuan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1961	306.786	332.133	638.919	92,73	-	-
1971	371.280	394.613	765.893	94,09	1,81	2,09
1980	438.001	459.721	897.722	95,28	1,60	2,66
1990	509.230	522.793	1.032.023	97,41	1,40	2,57
2000	557.611	564.030	1.121.641	99,37	0,80	2,03
2010	576.279	576.947	1.153.226	99,89	0,40	1,90
2020	656.386	649.090	1.305.476	101,10	1,10	1,11
2021	662.951	656.014	1.318.965	101	1,38	1,41
2022	671.015	664.445	1.335.460	101	1,31	1,33

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Sensus Penduduk 1961-2020 & Angka Proyeksi Penduduk Interim

Lampiran 2.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Majalengka, 2018-2022

No	Kecamatan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Lemahsugih	55.315	55.166	63 223	63.813	64.546
2	Bantarujeg	44.712	45.025	46 289	46.627	47.069
3	Malausma	40.330	40.183	47 784	48.472	49.275
4	Cikijing	57.705	57.781	67 467	68.238	69.165
5	Cingambul	36.477	36.634	42 604	43.308	44.117
6	Talaga	41.711	41.643	47 742	48.190	48.747
7	Banjaran	24.739	24.895	25 015	25.108	25.256
8	Argapura	35.805	36.074	36 470	36.750	37.112
9	Maja	48.897	49.018	52 155	52.498	52.957
10	Majalengka	71.390	71.679	73 052	73.420	73.948
11	Cigasong	32.233	32.140	37 763	38.130	38.582
12	Sukahaji	38.864	38.813	46 943	47.692	48.557
13	Sindang	14.406	14.425	16 912	17.165	17.458
14	Rajagaluh	41.769	41.859	46 819	47.350	47.990
15	Sindangwangi	32.576	32.923	34 315	34.708	35.181
16	Leuwimunding	58.307	58.475	63 932	64.743	65.704
17	Palasah	47.352	47.519	53 275	54.040	54.932
18	Jatiwangi	86.975	87.663	90 174	90.890	91.808
19	Dawuan	47.566	47.942	47 633	47.916	48.304
20	Kasokandel	48.811	49.241	52 808	53.498	54.313
21	Panyingkiran	31.876	32.217	32 691	32.987	33.357
22	Kadipaten	44.216	44.392	47 294	47.662	48.136
23	Kertajati	43.034	43.281	47 578	48.094	48.720
24	Jatitujuh	58.506	59.629	55 192	55.592	56.115
25	Ligung	61.043	61.798	65 770	66.719	67.826
26	Sumberjaya	54.685	54.619	64 576	65.355	66.285
Kabupaten Majalengka		1.199.300	1.205.034	1.305.476	1.318.965	1.335.460

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, SP 2020 dan Proyeksi Penduduk Interim Kabupaten Majalengka

Lampiran 3.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Majalengka, 2022

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Lemahsugih	32.907	31.639	64.546	104,01
2	Bantarujeg	23.460	23.609	47.069	99,37
3	Malausma	25.222	24.053	49.275	104,86
4	Cikijing	34.835	34.330	69.165	101,47
5	Cingambul	22.289	21.828	44.117	102,11
6	Talaga	24.679	24.068	48.747	102,54
7	Banjaran	12.584	12.672	25.256	99,31
8	Argapura	18.787	18.325	37.112	102,52
9	Maja	26.667	26.290	52.957	101,43
10	Majalengka	37.056	36.892	73.948	100,44
11	Cigasong	19.529	19.053	38.582	102,50
12	Sukahaji	24.311	24.246	48.557	100,27
13	Sindang	8.668	8.790	17.458	98,61
14	Rajagaluh	24.214	23.776	47.990	101,84
15	Sindangwangi	17.808	17.373	35.181	102,50
16	Leuwimunding	33.343	32.361	65.704	103,03
17	Palasah	27.569	27.363	54.932	100,75
18	Jatiwangi	46.161	45.647	91.808	101,13
19	Dawuan	24.034	24.270	48.304	99,03
20	Kasokandel	27.211	27.102	54.313	100,40
21	Panyingkiran	16.695	16.662	33.357	100,20
22	Kadipaten	24.296	23.840	48.136	101,91
23	Kertajati	24.161	24.559	48.720	98,38
24	Jatitujuh	27.818	28.297	56.115	98,31
25	Ligung	33.542	34.284	67.826	97,84
26	Sumberjaya	33.169	33.116	66.285	100,16
Kabupaten Majalengka		671.015	664.445	1.335.460	101

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Angka Proyeksi Penduduk Interim

Lampiran 4.
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Majalengka, 2022

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total (Laki-laki + Perempuan)
(1)	(2)	(3)	(4)
0-14	22,01	21,13	21,57
15-64	69,72	70,05	69,88
65+	8,27	8,82	8,55
Jumlah	100,00	100,00	100,00
<i>Dependency Ratio</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	43,17

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Angka Proyeksi Penduduk Interim

Lampiran 5.
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Distribusi dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Majalengka, 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Lemahsugih	78,64	64.546	4,83	821
2	Bantarujeg	66,52	47.069	3,52	708
3	Malasma	45,04	49.275	3,69	1.094
4	Cikijing	43,54	69.165	5,18	1.589
5	Cingambul	37,03	44.117	3,30	1.191
6	Talaga	43,50	48.747	3,65	1.121
7	Banjaran	41,98	25.256	1,89	602
8	Argapura	60,56	37.112	2,78	613
9	Maja	65,21	52.957	3,97	812
10	Majalengka	57,00	73.948	5,54	1.297
11	Cigasong	24,17	38.582	2,89	1.596
12	Sukahaji	32,52	48.557	3,64	1.493
13	Sindang	23,97	17.458	1,31	728
14	Rajagaluh	34,37	47.990	3,59	1.396
15	Sindangwangi	31,76	35.181	2,63	1.108
16	Leuwimunding	32,46	65.704	4,92	2.024
17	Palasah	38,69	54.932	4,11	1.420
18	Jatiwangi	40,03	91.808	6,87	2.293
19	Dawuan	23,80	48.304	3,62	2.030
20	Kasokandel	31,61	54.313	4,07	1.718
21	Panyingkiran	22,98	33.357	2,50	1.452
22	Kadipaten	21,86	48.136	3,60	2.202
23	Kertajati	138,36	48.720	3,65	352
24	Jatitujuh	73,66	56.115	4,20	762
25	Ligung	62,25	67.826	5,08	1.090
26	Sumberjaya	32,73	66.285	4,96	2.025
Kabupaten Majalengka		1.204,24	1.335.460	100,00	1.109

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Proyeksi Penduduk Interim

Lampiran 6.
Indeks Pembangunan Manusia serta Komponennya 2020-2022

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia	Umur Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun
		(Tahun)	(tahun)	(Tahun)	(juta rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2020	69,20	73,95	12,22	7,27	9.521
2021	69,42	74,14	12,23	7,31	9.591
2022	70,18	74,44	12,24	7,49	9.950

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Indeks Pembangunan Manusia 2020-2022

Lampiran 7.
Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Seminggu Lalu
di Kabupaten Majalengka, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas	915.383	923.776	953.722	963.481	972.828
Angkatan Kerja	601.920	627.874	664.374	651.559	644.128
Bekerja	572.120	600.450	625.576	614.417	617.320
Pengangguran Terbuka	29.800	27.424	38.798	37.182	26.808
Bukan Angkatan Kerja	313.463	295.902	289.348	311.922	328.700
Sekolah	63.539	53.311	49.283	45.877	64.677
Mengurus Rumah Tangga	216.246	206.188	199.756	219.194	214.007
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	65,76	67,97	69,66	67,63	66,21
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	4,95	4,37	5,84	5,71	4,16

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Sakernas 2018-2022

Lampiran 9.
Penduduk Laki-laki 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Seminggu
Lalu di Kabupaten Majalengka, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas	453.214	457.383	472.291	477.036	481.533
Angkatan Kerja	384.601	384.636	400.691	387.856	400.839
▪ Bekerja	363.870	369.694	376.156	364.416	383.982
▪ Pengangguran Terbuka	20.731	14.942	24.535	23.242	16.857
Bukan Angkatan Kerja	68.613	72.747	71.600	89.180	80.694
▪ Sekolah	27.808	30.533	24.768	23.535	31.725
▪ Mengurus Rumah Tangga	15.236	18.505	19.723	34.018	14.690
▪ Lainnya	25.569	23.709	27.109	31.627	34.279
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	84,86	84,09	84,84	81,31	83,24
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	5,39	3,88	6,12	5,99	4,21

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Sakernas 2018-2022

Lampiran 9.
Penduduk Perempuan 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama
Seminggu Lalu di Kabupaten Majalengka, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas	462.169	466.393	481.431	486.445	491.295
Angkatan Kerja	217.319	243.238	263.683	263.743	243.289
▪ Bekerja	208.250	230.756	249.420	249.803	233.338
▪ Pengangguran Terbuka	9.069	12.482	14.263	13.940	9.951
Bukan Angkatan Kerja	244.850	223.155	217.748	222.702	248.006
▪ Sekolah	35.731	22.758	24.515	22.342	32.952
▪ Mengurus Rumah Tangga	201.010	187.683	180.003	185.176	199.317
▪ Lainnya	8.109	12.714	13.200	15.184	15.737
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	47,02	52,15	54,77	54,21	49,52
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	4,17	5,13	5,41	5,28	4,09

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Sakernas 2018-2022

Lampiran 10.
Jumlah Penduduk miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Majalengka 2010-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Tingkat Kemiskinan (P0) (Persen)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (persen)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	181,10	263.377	15,52	2,55	0,67
2011	178,60	300.741	14,98	2,11	0,46
2012	168,60	326.962	14,46	2,52	0,69
2013	164,90	353.727	14,07	2,24	0,55
2014	158,01	368.900	13,42	1,98	0,48
2015	167,50	379.354	14,19	2,34	0,60
2016	152,50	393.071	12,85	2,06	0,52
2017	150,26	409.559	12,6	1,93	0,45
2018	129,29	440.776	10,79	1,96	0,51
2019	121,10	445.184	10,06	1,39	0,28
2020	138,20	453.201	11,43	1,41	0,25
2021	151,10	466.813	12,33	2,44	0,77
2022	147,10	483.319	11,94	1,55	0,36

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Susenas 2010-2022

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



***BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAJALENGKA***

Jl. Gerakan Koperasi No. 39 Majalengka, Jawa Barat - 45411

Homepage : <https://majalengkakab.bps.go.id>

E-mail : bps3210@bps.go.id

